

LAPORAN AKHIR

**BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
SUMATERA SELATAN**

TAHUN ANGGARAN 2022



**BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA SELATAN
BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan bimbinganNya, Laporan Akhir Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan ringkasan hasil semua kegiatan Balai yang telah dilakukan selama satu tahun dan merupakan pertanggung jawaban dalam rangka pelaksanaan mandat, tugas, dan fungsi BPTP Sumatera Selatan selama Tahun Anggaran 2022.

Terimakasih disampaikan kepada seluruh Staf BPTP Sumatera Selatan yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran dalam melaksanakan mandat, tugas, dan fungsi Balai selama Tahun 2022. Semoga laporan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna.

Palembang, 31 Desember 2022
Kepala Balai



Dr. Suharyanto,SP.MP
NIP. 197106131998031 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas, Visi dan Misi BPTP Sumatera Selatan	2
1.3 Struktur Organisasi	3
1.4 Sarana dan Prasarana	4
1.5 Sumber Daya Manusia	5
II. HASIL KEGIATAN	
2.1 Sub Bagian Tata Usaha.....	10
2.1.1. Pendidikan dan Latihan	10
2.1.2. <u>Urusan Rumah Tangga dan</u> <u>Perlengkapan</u>	12
2.1.3. Keuangan	14
2.1.4. Penyusunan Laporan Keuangan SAI pada Sekretariat UAPPA/B-W	16
2.1.5. Sistem Pengendalian Intern/Wilayah Bebas Korupsi	18
2.2 Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian	26
2.2.1. Kerjasama	26
2.2.2. Pengelolaan Perpustakaan	27
2.2.3. Pengelolaan Website.....	28
2.2.4. Pengelolaan Laboratorium	44
2.2.5. Pengelolaan Kebun Percobaan Kayuagung	45
2.2.6. Pengelolaan Kebun Percobaan Karang Agung	46
2.2.7. PPID.....	47
2.2.8. Laboratorium Diseminasi.....	48
2.3 KEGIATAN PERBENIHAN.....	49
III. PENUTUP	49
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Keadaan Kekayaan Barang Bergerak yang Dikelola Lingkup BPTP Sumatera Selatan tahun 2022.....	4
2. Rekapitulasi Pegawai Menurut Golongan Ruang per Desember 2018.....	6
3. Rekapitulasi Pegawai Menurut Golongan/Ruang dan Pendidikan Akhir per Desember 2022	6
4. Rekapitulasi Pegawai Menurut Golongan dan Kelompok Umur per Desember 2022.....	6
5. Rekapitulasi Pegawai Menurut Golongan dan Pendidikan Akhir per Desember 2022.....	7
6. Rekapitulasi Pegawai Menurut Kelompok Fungsional per Desember 2022.....	7
7. Rekapitulasi Pegawai Menurut Kelompok Fungsional Peneliti per Desember 2022.....	7
8. Rekapitulasi Pegawai Menurut Kelompok Fungsional Penyuluh	8
9. Rekapitulasi Pegawai Menurut Kelompok Fungsional Pustakawan per Desember 2022	8
10. Rekapitulasi Pegawai Menurut Kelompok Fungsional Litkayasa per Desember 2022	8
11. Rekapitulasi Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Golongan Ruang per Desember 2022	8
12. Rekapitulasi Pegawai Menurut Golongan, Pendidikan akhir dan Jenis Kelamin per Desember 2022	9
13. Pegawai BPTP Sum-Sel yang sedang mengikuti Pendidikan	10
14. Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia.....	10
16. Capaian Kinerja Indikator Pengelolaan BMN.....	13
17. Kegiatan Penyelesaian Hibah dan Penghapusan Belanja 526.....	13
18. Realisasi Penggunaan Dana dari DIPA BPTP Sumsel tahun 2022.....	15
19. Realisasi Penggunaan Kegiatan yang di Danai SMARTD Tahun 2022.....	15
20. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2022.....	16

21. Jenis, Kegiatan, Ringkasan Hasil dan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan SPI BPTP Sumsel Triwulan I Tahun 2022.....	22
22. Jenis, Kegiatan, Ringkasan Hasil dan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan SPI BPTP Sumsel Triwulan II Tahun 2022.....	22
23. Jenis, Kegiatan, Ringkasan Hasil dan Rekomendais Hasil Pelaksanaan Kegiatan SPI BPTP Sumsel Triwulan III Tahun 2022.....	23
24. Jenis, Kegiatan, Ringkasan Hasil dan Rekomendais Hasil Pelaksanaan Kegiatan SPI BPTP Sumsel Triwulan IV Tahun 2022.....	24
25. Program Kerja Satuan Pelaksanaan Pengendalian Intern BPTP Sumsel (Satlak PI BPTP Sumsel) Tahun 2022	25

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
1.	Struktur Organisasi BPTP Sumatera Selatan	
2.	Pengelolaan Perpustakaan.....	
3.	Pengelolaan Website.....	
4.	Pengelolaan Laboratorium.....	
5.	Pengelolaan KP Kayu Agung.....	
6.	Pengelolaan KP Karang Agung.....	
7.	Pengelolaan PPID.....	

SUBBAGIAN TATA USAHA

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44 tahun 2020 yang ditetapkan tanggal 23 Desember 2020 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian bahwa Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan (BPTP Sumsel) adalah unit pelaksana teknis di bidang pengkajian teknologi pertanian spesifik lokasi, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. Organisasi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Balai.

BPTP Sumatera Selatan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, perakitan, pengembangan dan diseminasi teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi. Salah satu fungsi BPTP Sumatera Selatan yaitu pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, surat menyurat dan perlengkapan. Urusan kepegawaian adalah pelayanan kepada seluruh pegawai mulai dari kenaikan pangkat dan gaji, mutasi, usulan tunjangan kinerja, surat BPJS, usulan latihan dan tugas belajar, pengusulan angka kredit dan surat fungsional lainnya. Urusan rumah tangga dan perlengkapan adalah pelayanan peminjaman kendaraan roda empat dan roda dua, sarana teknis, pemeliharaan gedung kantor, halaman dan pemeliharaan instalasi pengkajian hingga dokumentasi kegiatan. Urusan keuangan adalah melaksanakan pelayanan terkait panjar kegiatan, penyelesaian administrasi keuangan dan surat tugas perjalanan dinas. Fungsi-fungsi tersebut di atas dalam tata kerja dan struktur organisasi BPTP Sumatera Selatan menjadi tanggungjawab Kepala Subbagian Tata Usaha.

Kepala Subbagian Tata Usaha wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Balai secara berkala dalam bentuk laporan akhir tahun yang berisi informasi kegiatan selama 12 (dua belas) bulan sejak Januari –

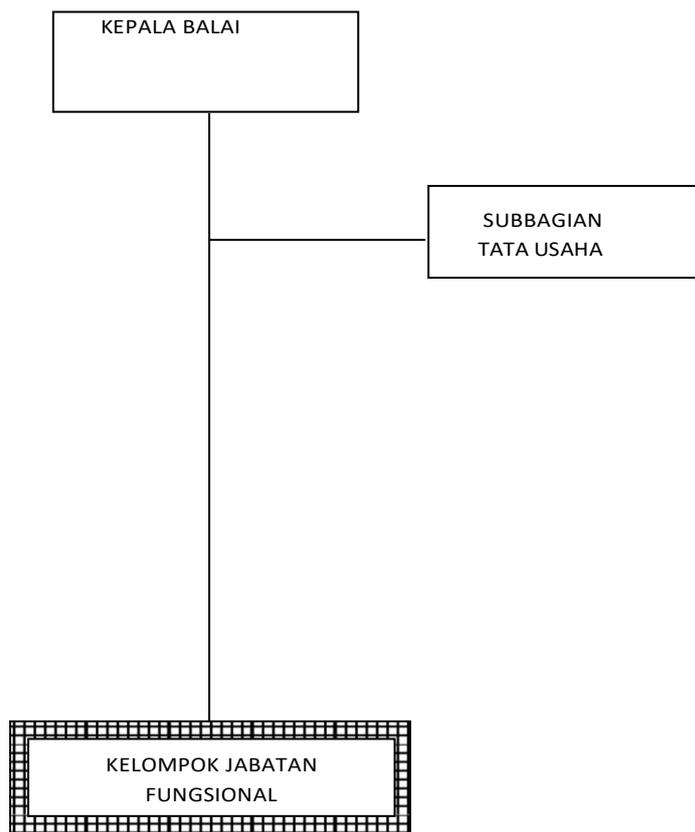
Desember 2022 atas kegiatan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, surat menyurat dan perlengkapan.

II. PROFIL BPTP SUMSEL

A. Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) yang baru Nomor 44 tahun 2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Litbang Pertanian, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan terdiri atas: Kepala, Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Laporan Akhir RKTU Ketatausahaan Tahun 2022 BPTP Sumatera Selatan ini disusun untuk menginformasikan implementasi pelaksanaan kegiatan kepegawaian, rumah tangga dan penatausahaan barang milik negara Sumatera Selatan selama Tahun 2022. Laporan ini tentunya dapat dijadikan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan lain yang sejenis agar lebih baik lagi di masa mendatang.



Gambar 1. Struktur Organisasi BPTP Sumatera Selatan

B. Tugas dan Fungsi

Tugas BPTP Sumatera Selatan melaksanakan pengkajian, perakitan dan pengembangan dan diseminasi teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BPTP Sumatera Selatan menyelenggarakan **fungsi** sebagai berikut

1. pelaksanaan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, evaluasi, laporan pengkajian, perakitan, pengembangan, dan diseminasi teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
2. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
3. pelaksanaan penelitian, pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
4. pelaksanaan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
5. perakitan materi penyuluhan dan diseminasi hasil pengkajian teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
6. pelaksanaan bimbingan teknis materi penyuluhan dan diseminasi hasil pengkajian teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
7. penyiapan kerja sama, informasi, dokumentasi, serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengkajian, perakitan, dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
8. pemberian pelayanan teknik pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
9. pendampingan penerapan teknologi mendukung pelaksanaan program dan kegiatan strategis pertanian; dan

10. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, dan penatausahaan barang milik negara.

C. Tujuan dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022

Tujuan adalah mencapai optimalisasi penyelenggaraan dan penatausahaan perkantoran untuk mendukung peningkatan kinerja BPTP Sumatera Selatan dalam percepatan pengkajian dan diseminasi maka perlu adanya rencana kegiatan tingkat manajemen, yang meliputi aspek manajemen dan layanan perkantoran melalui kegiatan pemeliharaan sistem manajemen mutu, administrasi perkantoran dan pembinaan administrasi kepegawaian, perlengkapan, kearsipan, pelaporan SAI, peningkatan kapasitas pegawai, kinerja dan diseminasi, sistem pengendalian intern, layanan perkantoran meliputi pembayaran gaji/lembur/vakasi pegawai, operasional dan pemeliharaan perkantoran, kebutuhan sehari-hari pegawai.

Keluaran kegiatan Subbagian Tata Usaha sebagai berikut :

- terlaksananya pemeliharaan sistem manajemen mutu sni iso 9001:2015
- terlaksananya pengelolaan administrasi perkantoran, perlengkapan, kearsipan, pelaporan sai
- terlaksananya peningkatan kapasitas pegawai
- terselenggaranya layanan perkantoran
- terlaksananya operasional dan pemeliharaan gedung perkantoran

Adapun sasaran kegiatan Subbagian Tata Usaha BPTP Sumatera Selatan pada Tahun 2022 disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Tujuan dan Sasaran kegiatan Tahun 2022

No	Tujuan	Keluaran	Rincian Aktivitas
1	Melaksanakan manajemen pengelolaan satker	Terkelolanya satker BPTP Sumsel dengan standar mutu ISO	<ul style="list-style-type: none">• Pemeliharaan mutu manajemen satker• Administrasi perkantoran dan

No	Tujuan	Keluaran	Rincian Aktivitas
		9001:2015	Administrasi Kepegawaian <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Perlengkapan, Kearsipan dan Sistem Akuntansi Instansi • Peningkatan Kapasitas SDM • Peningkatan Kapasitas Kinerja dan diseminasi
2	Melaksanakan layanan perkantoran	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan bagi 60 ASN	<ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran gaji dan tunjangan
3	Melaksanakan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	Terpeliharanya operasional dan sarana dan prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • Kebutuhan sehari-hari • Langganan Daya dan Jasa • Pemeliharaan perkantoran • Pembayaran terkait pelaksanaan

III. PROSEDUR PELAKSANAAN

Kegiatan Sub Tata Usaha yang berlangsung selama 12 bulan (Januari-Desember) yang meliputi sebagai berikut :

- I. Layanan Manajemen Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian
 - a. Pemeliharaan Mutu Manajemen Satker
 - b. Administrasi Perkantoran dan Administrasi Kepegawaian
 - c. Pengelolaan Perlengkapan, Kearsiapan dan Sistem Akuntansi Instansi
 - d. UAPPA/B-W
 - e. Peningkatan Kapasitas SDM

- II. Layanan Perkantoran
 - a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan
 - b. Operasional dan Pemeliharaan Kantor
 - c. Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran
 - d. Pemeliharaan Perkantoran
 - e. Pembayaran Terkait Pelaksanaan Perkantoran

Tahapan kegiatan masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :

- A. Pemeliharaan mutu manajemen satker
 - a. Melaksanakan Tinjauan Umum Manajemen
 - b. Melaksanakan Audit Internal
 - c. Melaksanakan Audit Resertifikasi ISO 9001:2015
 - d. Melaksanakan Perbaikan Audit
 - e. Mengendalikan Dokumen dan Rekaman

B. Administrasi Perkantoran dan Administrasi Kepegawaian

1. Administrasi Perkantoran

- a. Menyusun SK Organisasi dan Pengelola Anggaran
- b. Melaksanakan Penyusunan Surat Keputusan Kegiatan
- c. Menyusun atau Memperbaharui SOP
- d. Melaksanakan pengelolaan keuangan belanja dan pendapatan
- e. Mengajukan SPP dan SPM
- f. Melaksanakan UP, TUP dan GUP
- g. Melakukan Rekonsiliasi dengan KPPN
- h. Menatausahakan Surat Menyurat

2. Pembinaan Administrasi Kepegawaian

- a. Konsultasi Kegiatan Terkait Kenaikan Pangkat
- b. Mensosialisasikan Peraturan-peraturan Kepegawaian
- c. Memberikan Pelayanan Urusan Kepegawaian
- d. Melakukan Pembinaan Jasmani dan Rohani
- e. Menyampaikan Usulan Berkas Administrasi Kepegawaian
- f. Melaksanakan Regrouping dan Menyusun Peta Jabatan
- g. Menyusun Daftar Nominatif Pemangku Jabatan
- h. Menyusun dan Menyediakan Bahan Penilaian Prestasi Pekerjaan berupa Sasaran Kerja Pegawai
- i. Menyusun Nominatif Tunjangan Kinerja dan Perubahannya
- j. Mendokumentasikan Kegiatan

3. Pengelolaan Perlengkapan, Kearsipan dan SAI.

- a. Menyusun pengelola anggaran perlengkapan, kearsipan dan SAI
- b. Melaksanakan perekaman data transaksi pada aplikasi SAKTI dan membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran
- c. Melakukan Rekonsiliasi dengan KPPN dan KPKNL
- d. Membuat daftar kearsipan, perbaikan daftar barang ruangan
- e. Menyusun dan membuat laporan SAI secara berkala
- f. Melaksanakan penatausahaan BMN

4. Peningkatan Kapasitas SDM

- a. Identifikasi kebutuhan pendidikan, pelatihan dan magang yang dilakukan oleh tim SDM, selanjutnya dibuat matriks kebutuhan dilakukan oleh analis kepegawaian
- b. Mengusulkan kepada kepala Balai untuk nama-nama nominatif
- c. Mengirimkan usulan calon peserta ke lembaga pendidikan/pelatihan/magang
- d. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pendidikan/ pelatihan/magang
- e. Mendokumentasikan kegiatan

5. Layanan Perkantoran

- a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan
- b. Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor, berupa:
 - Kebutuhan sehari-hari perkantoran
 - Langganan Daya dan Jasa
 - Pemeliharaan Perkantoran
 - Pembayaran terkait Pelaksanaan Perkantoran

IV. TENAGA DAN ORGANISASI PADA SUBBAG TATA USAHAAN

Untuk melaksanakan kegiatan pelayanan pada sub bag Tata Usaha, maka personil yang terlibat seperti pada Tabel 2.

Tabel 2. Sumberdaya yang terlibat dalam kegiatan subbag Tata Usaha

No	Nama/NIP	Jabatan dalam Kegiatan	Uraian Tugas	Alokasi Waktu (Jam/minggu)
1.	Rosidah, SE	Kasubbag TU	Mengkoordinir kegiatan keuangan, kepegawaian, rumah tangga, BMN dan pelaporan	25
2.	Dra. Masrifawati	Pengadmitrasi dan Penyaji Data Kepegawaian	Melaksanakan kegiatan Kepegawaian sampai pelaporan	20
3.	Nurlena, S.P.	Pengadmitrasi dan Penyaji Data Kepegawaian	Melaksanakan kegiatan Kepegawaian sampai pelaporan	20
4.	Harjuma, A.Md.	Pengadministrasi Keuangan	Melaksanakan tugas pengelolaan keuangan sampai pelaporan	20
5.	Drs. M. Syahrul	Penghimpun dan Pengolah Data	Melaksanakan tugas pengelolaan keuangan sampai pelaporan	20
6.	Herman Susila, S.H	Verifikator Keuangan	Melaksanakan verifikasi keuangan	20

			dan laporan SAK satker	
No	Nama/NIP	Jabatan dalam Kegiatan	Uraian Tugas	Alokasi Waktu (Jam/ mgg)
7.	Harjuma, A.Md.	Pelaksana kegiatan Rumah tangga dan Pemeliharaan sarana/prasarana	Melaksanakan kegiatan rumah tangga dan pemeliharaan sarana/prasarana sampai pelaporan	20
8.	Vinna Septiana, A.Md.	Pelaksana Pengadaan barang dan Jasa/ Pendamistrasi dan Penyaji Data	Melaksanakan pengadaan sarana/prasarana sampai pelaporan/rumah tangga	20
9.	Sherly, SE	Pelaksana Pengadaan barang dan Jasa/ Pendamistrasi dan Penyaji Data	Melaksanakan pengadaan sarana/prasarana sampai pelaporan/rumah tangga	20
10.	Risky Wiraswasty, A.Md	Petugas SIMAK BMN	Pengelola SIMAK BMN	20
11.	Muhtiar Fikri, A.Md.	Petugas SAK	Pengelola SAK	20
12.	Erni Herawati, S.E.	Bendahara Pengeluaran	Melaksanakan pengelolaan keuangan satker	20
13.	Lince Sitorus, S.E.	Bendahara	Melaksanakan	23

		Penerima	pengelolaan PNB	
14.	Triaster Aguslim, SS	Penghimpun dan Pengolah Data	Melaksanakan tugas pengelolaan keuangan sampai pelaporan	20
No	Nama/NIP	Jabatan dalam Kegiatan	Uraian Tugas	Alokasi Waktu (Jam/ mgg)
15.	Anita Karlina, S.E.	Pengelola keuangan dan Petugas Pengelola Belanja Pegawai	Melaksanakan adminsitrasi Keuangan dan Pengelolaan Belanja Pegawai	20
18.	Joko Usman	Caraka	Melakukan tugas Caraka	20

V. CAPAIAN KINERJA

A. Pemeliharaan Mutu Manajemen Satker

Organisasi BPTP Sumatera Selatan yang memperoleh sertifikat SNI ISO 9001:2008 sejak Tahun 2010, telah perolehan sertifikat Pada Juni 2017 menerima sertifikat standar sistem manajemen mutu SNI ISO 9001:2008 untuk lingkup Pengkajian dan Diseminasi Teknologi Pertanian Spesifik Lokasi. Sertifikat tersebut merupakan wujud komitmen BPTP Sumatera Selatan untuk meningkatkan kinerja dan menerapkan layanan terbaik bagi seluruh pihak yang berkepentingan, dilanjutkan dengan perolehan sertifikasi SNI ISO 9001:2015 sejak 2018 hingga tahun 2022.

Proses sertifikasi SNI ISO 9001:2008 dimulai pada bulan Juni 2017, Hasil audit Surveilans menunjukkan bahwa BPTP Sumatera Selatan telah memenuhi persyaratan sistem manajemen mutu SNI ISO 9001:2008 dan terdaftar dalam Skema Mutu Certification, setelah ditutupnya perbaikan atas 3 temuan Minor dan 4 Saran maka diterbitkan Sertifikat diterbitkan PT MUTUAGUNG LESTARI yang ditandatangani oleh Presiden Direktur Mutu Certification International Ir. H. Arifin Lambaga, MSE dengan ruang lingkup Pengkajian dan Diseminasi Teknologi Pertanian Spesifik Lokasi Mencakup Area Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian, dan Kelompok Jabatan Fungsional (*Study and Dissemination of Location-Specific Agriculture Technology Covering Administration Sub-Division, Cooperation dan Study Service Section, and Study Service, and Function Group*). dan di tahun 2022 pada bulan Juli 2022 dilakukan Audit Resertifikasi ISO 9001:2015 setelah ditutupnya perbaikan atas 3 temuan Minor dan 2 Saran maka diterbitkan Sertifikat diterbitkan PT MUTUAGUNG LESTARI, dengan ruang lingkup *Study and Dissemination of Location Specific Agricultural Technology Management of Experimental*.

Tabel 3. Capaian kinerja pemeliharaan mutu satker sebagai berikut

Indikator Kinerja	Target	Capaian	Presentase Capaian
Diperolehnya sertifikat ISO 9001:2015	1 Sertifikat	1 Sertifikat	100

B. Administrasi Perkantoran dan Administrasi Kepegawaian

Kegiatan administrasi perkantoran sehari hari adalah pelayanan selama 12 bulan baik untuk pelayanan administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian.

Capaian kinerja administrasi perkantoran dan administrasi kepegawaian adalah sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia

Untuk menjalankan program dalam wujud beberapa kegiatan, BPTP Sumatera Selatan memiliki sumber daya manusia sebanyak 76 orang terdiri dari 57 PNS dan 19 tenaga kontrak, namun pada bulan Agustus tahun 2022 terjadi mutasi fungsional peneliti ke Badan Riset dan Inovasi Nasional sebanyak 10 Pegawai sehingga di akhir 2022 jumlah pegawai yang ada sebanyak 56 pegawai. Tenaga-tenaga ini menyebar di kantor BPTP Sumatera Selatan 38 orang, Kebun Percobaan Kayuagung di Kabupaten OKI 10 orang dan Kebun Percobaan Karang Agung di Kabupaten Banyuasin 3 orang. Dengan adanya transformasi kelembagaan dan beberapa pejabat fungsional peneliti berpindah ke Badan Riset dan Inovasi Nasional maka jumlah pegawai BPTP pada akhir 2022 yaitu berjumlah 47 orang, terdiri dari 38 orang berada di BPTP Sumatera Selatan, 6 orang di IP2TP Kayuagung dan 3 orang di IP2TP Karang Agung

Tabel 1. Rekapitulasi Kepangkatan berdasarkan jenjang pendidikan

No.	Gol	SLTP	SLTA	D3	D4	S1	S2	S3	Jumlah	%
1	I	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2	II	2	4	1	0	0	0	0	7	14,89
3	III	0	2	2	1	22	6	0	33	70,21
4	IV	0	0	0	0	2	4	1	7	14,89
Jumlah		2	6	3	1	24	10	1	47	100,00

Bila dilihat dari fungsinya, maka SDM yang sudah menduduki jabatan fungsional sebagai berikut:

Tabel 2. Rekapitulasi Jabatan Fungsional

No.	Pendidikan	Golongan			Jumlah
		II	III	IV	
1	Struktural	-	1	1	2
2	Penyuluh	0	8	4	12
3	PMHP	0	6	0	6
4	PBT	2	0	0	2
5	Pustakawan	0	1	0	1
6	Pranata Keuangan APBN Mahir	0	1	0	1
7	Pranata Keuangan APBN Penyelia	0	1	0	1
8	Calon Analis Kimia	0	1	0	1
9	JFU	2	19	0	21
Jumlah		4	38	5	47

Untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan BPTP Sumatera Selatan, maka perlu dilakukan peningkatan kemampuan SDM melalui pelatihan dan pendidikan lanjutan dengan menyekolahkan staf ke jenjang yang lebih tinggi. Ini sudah merupakan komitmen Badan Litbang Pertanian untuk meningkatkan kemampuan SDM melalui pendidikan tinggi.

2. Pendidikan dan Latihan

Untuk meningkatkan pendidikan tenaga peneliti dan non peneliti telah dilakukan berbagai upaya melalui jalur formal dengan biaya pemerintah maupun dengan biaya sendiri. Jenjang pendidikan yang diikuti adalah S3 dan S2 dengan berbagai disiplin Ilmu seperti terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 3. Rekapitulasi Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur per Desember 2022

No	Jenis kelamin	21-25 Tahun	26-30 Tahun	31-35 Tahun	36-40 Tahun	41-45 Tahun	46-50 Tahun	51-55 Tahun	56-60 Tahun	Jmh
1	Laki-Laki	0	1	2	1	2	4	7	5	20
2	Perempuan	0	0	4	9	3	4	4	3	27
	Jumlah	0	1	6	10	5	6	11	8	47

Tabel 4. Rekapitulasi Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Golongan/Ruang Per Desember 2022

No	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	I/c	-	-	-
2	I/d	-	-	-
	Jumlah Gol. I	-	-	-
3	II/a	-	-	-
	II/b	2	-	2
4	II/c	2	1	3
5	II/d	2	-	2
	Jumlah Gol. II	6	1	7
6	III/a	3	2	5
7	III/b	4	6	10
8	III/c	3	10	13
9	III/d	2	3	5
	Jumlah Gol. III	12	21	33
10	IV/a	1	4	5
11	IV/b	1	1	2

12	IV/c	0	0	0
13	IV/d	0	0	0
	Jumlah Gol. IV	2	5	7
	Total	20	27	47

Tabel 5. Rekapitulasi Pegawai Menurut Golongan, Pendidikan Akhir dan Jenis Kelamin per Desember 2022

No	Golongan /Ruang	Pendidikan Akhir dan Jenis Kelamin																Jumlah	
		S3		S2		S1		D4		D3		SLTA		SLTP		SD			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
1	GOL. I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	GOL. II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	2	0	0	0	0	7
3	GOL. III	0	0	3	3	5	17	1	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	33
4	GOL. IV	1	0	0	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
	Jumlah	1	0	3	7	6	18	1	0	1	2	6	0	2	0	0	0	0	47

Tabel 6. Pegawai BPTP Sumsel yang sedang mengikuti pendidikan

No	Nama	Program	Jurusan	Tempat	Sumber Biaya	Tahun mulai	Tahun Selesai
1	drh.Aulia Evi Susanti, M.Sc	S3	Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan	IPB	Badan Litbang	2019	Belum Selesai
2	Masito, S.Pt	S2	Ilmu Peternakan	UGM	Badan Litbang	2022	Belum Selesai
3	Maulida Surayya, S.P	S2	Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan	UGM	Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)	2022	Belum Selesai

Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Penanggung Jawab Kepegawaian pada tahun anggaran 2022 sejak triwulan pertama sampai pada triwulan keempat adalah sebagai berikut : 1) Kenaikan Gaji Berkala ; 39 orang, 2) Kenaikan Pangkat ; periode April 1 orang dan periode Oktober 5 orang. Pegawai yang pensiun BUP sebanyak 4 orang, pensiun meninggal dunia sebanyak 1 orang. Kenaikan Jabatan fungsional penyuluh Madya 2 orang, Pengangkatan jabatan fungsional

penyuluh Madya 1 orang dan penyuluh pertanian pertama 1 orang, pengangkatan jabatan fungsional pranata keuangan APBN 2 orang.

Untuk pengoperasian Software SIM ASN tersebut pada tahun anggaran 2022 telah dapat dilaksanakan dengan baik, dengan demikian diharapkan dalam penampilan dan penyajian data-data kepegawaian dapat lebih akurat dan cepat seperti penampilan daftar Nominatif pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, umur, pangkat/golongan dan Eselon, penampilan kapan kenaikan pangkat pegawai, kenaikan gaji berkala, kapan pensiun.

B. Urusan Rumah Tangga dan Perlengkapan

Urusan rumah tangga dan perlengkapan meliputi penerimaan, pencatatan, pemindahan, pengelolaan dan pemeliharaan barang milik negara meliputi tanah, bangunan gedung kantor, halaman, auditorium, wisma tamu, gedung laboratorium, rumah jabatan, aset kebun percobaan, kendaraan dan mesin lainnya.

Pada tahun 2022 telah dilakukan pemeliharaan kantor BPTP,

1. Melakukan urusan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan: Pemasangan Atap Pet Gedung
Perpustakaan, Pemasangan Daun Pintu Dapur dan Gedung Arsip
2. Melakukan Pemeliharaan Rumah Tamu: Plester Tembok Batas dan Pengecatan Pagar Bagian Dalam
3. Melakukan/penyiapan pembayaran Listrik, Air, Internet dan sarana komunikasi lainnya;terlampir
4. Melakukan urusan Pemeliharaan dan perbaikan barang inventaris milik BPTP Sumatera Selatan seperti: Pendingin ruangan (AC), Penerangan Ruangan, Komputer, Sarana Air Bersih, Graningset, Mesin rumput, dan lain-lain.
6. Melakukan penyiapan penyelenggaraan upacara bulanan dan apel pagi setiap hari senin.
7. Mengkoordinir urusan kebersihan ruangan kantor, gedung, Rumah Dinas, Rumah, Tamu, halaman kantor dan peralatan kantor.
8. Mengkoordinir SATPAM untuk menciptakan ketertiban dan keamanan kantor.

9. Melakukan/menyiapkan Peminjaman Peralatan Sarana Kantor untuk mendukung penelitian, pengkajian dan penyuluhan.
10. Melakukan Pengelolaan Sarana Teknis: Menginventaris Peminjaman dan Pengembalian Peralatan lainnya.
11. Melakukan inventarisasi barang yang digunakan oleh Peneliti yg ke BRIN
12. Melakukan Pengaturan Supir dan Penggunaan Mobil Dinas yang melaksanakan Perjalanan Dinas, Rapat, Bank, BKN dan lain-lain
13. Melakukan Perbaikan Kendaraan: BG 1472 MZ, BG BG 9505MZ dan B8738MS .
14. Membayar pajak kendaraan dinas: BG 1472 MZ, BG 2914 AAZ, BG 6292 NZ, BG 6293 NZ, BG 6295 NZ dan BG 6296 NZ.
15. Melakukan Perbaikan Kendaraan: BG 1753 RZ, BG BG 9505MZ dan BG 1073 RZ .
16. Membayar pajak kendaraan dinas: BG 1501 LZ, BG 9846 MZ, BG 2508 ABA.
17. Melakukan Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan: Jhondere, Iseki dan BG 1073 RZ
18. Melakukan Pembayaran Pajak Kendaraan BG.2508 ABA

Tabel 7. Capaian kinerja indikator pengelolaan BMN seperti berikut

Indikator Kinerja	Target	Capaian	% Capaian
Terlaksananya penertiban BMN	2 usulan permohonan penghapusan	2 usulan permohonan penghapusan	100
Tersedianya daftar surat masuk dan keluar	2 daftar surat	3 daftar surat	100
Laporan Keuangan	2 Laporan	2 Laporan	100
Laporan Barang	2 laporan	2 Laporan	100

Pelaksanaan kegiatan surat menyurat selama Tahun 2022 berjumlah 2.147 surat terdiri atas surat yang masuk berjumlah 86 baik dari instansi vertikal maupun instansi horisontal, dan surat keluar sejumlah 2.061 kepada instansi vertikal dan instansi horisontal serta surat keterangan.

C. Sarana dan Prasarana

Keberhasilan pelaksanaan penelitian dan pengkajian perlu ditunjang dengan tersedianya sarana dan prasarana. Kantor BPTP Sumsel berada di atas lahan seluas 5.100 m². Di tanah ini berdiri beberapa gedung yang difungsikan untuk kegiatan administrasi dan tenaga fungsional dengan luas lantai dasar 369,36 m², gedung keuangan 178,22 m², gedung pelayanan teknis (laboratorium, perpustakaan) dengan luas lantai dasar 470,69 m², luas garasi kendaraan bagian bawah 173,46 m² dengan bagian belakang berlantai dua, Pos Satpam 36,19 m², gudang 78,59 m², menara air 14,34 m² dan luas aula 648,65 m².

Kebun Percobaan Kayuagung dengan luas lahan 26,6 ha, status tanahnya adalah hak guna pakai. Berada di Desa Sidakersa Kecamatan Kota Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan agroekosistem Lebak. Kebun ini dapat dijangkau dengan mudah dari Palembang dengan kendaraan roda empat. Berada di tepi jalan Trans Sumatera. Berdasarkan tipenya maka KP ini memiliki lahan lebak dalam 49,4%, lebak tengahan 19,4% dan lebak dangkal 31,2% dari luas lahan. Kebun ini berada pada ketinggian 31 m di atas permukaan laut. Adapun KP. Karang Agung dengan luas 20 ha, status tanahnya adalah pinjaman. Berada di Desa Sukamulia Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin. Untuk menjangkau kebun ini, setelah mengendarai kendaraan roda empat dari Palembang kurang lebih 3,5 jam, maka dilanjutkan dengan menggunakan *speed boat* selama 30 menit. Agroekosistem kebun ini pasang surut, bertipe luapan B/C yang berada pada ketinggian 29 m di atas permukaan laut.

Untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, maka di lingkup BPTP Sumsel saat ini terdapat 8 kendaraan dinas roda empat, sedangkan fasilitas lapangan terdiri dari alat angkut bermotor roda tiga 4 unit, traktor tangan 4 unit, Transplanter 1 unit, perontok gabah 2 unit, box dryer 2 unit dan ditunjang dengan beberapa fasilitas untuk pengolahan benih.

Lebih lanjut mengenai keadaan kekayaan barang bergerak lingkup BPTP Sumatera Selatan sampai akhir tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 7. Keadaan Kekayaan Barang Bergerak yang Dikelola Lingkup BPTP Sumatera Selatan tahun 2022

Kendaraan Roda Empat

No	Jenis Kendaraan	No. Polisi	Pemakai	Posisi Kendaraan
1.	Toyota Kijang Innova(Bensin)	BG 1753 RZ	Ka. Balai	BPTP
2.	Toyota Kijang Innova(Bensin)	BG 1342 RZ	Ka. Balai	BPTP
3.	Toyota Kijang Innova(Solar)	BG 1073 RZ	Pool Kendaraan	BPTP
4.	Suzuki Vitara	BG 1501 LZ	Pool Kendaraan	BPTP
5.	Toyota Kijang	BG 1472 MZ	Pool Kendaraan	BPTP
6.	Toyota Kijang	BG 1993 LZ	Pool Kendaraan	BPTP
7.	Toyota Hilux Double Kabin	BG 9786 MZ	Pool kendaraan	BPTP
8.	Toyota Hilux Pickup	BG 9505 MZ	Pool kendaraan	BPTP
9.	Toyota Hilux Pickup	F 9846 MZ	Pool kendaraan	KP Kayu Agung
10.	Traktor NT 540 F		Pool kendaraan	BPTP
11.	Traktor JD 5054		Pool kendaraan	BPTP

Kendaraan Roda Tiga

1.	Viar	BG 6414 PZ	Umum	KP Kayuagung
2.	Viar	F 5371 A	Umum	KP Kayuagung
3.	Viar	F 5398 A	Umum	KP Kayugung
4	Viar	BG 6415 PZ	Umum	KP Karang Agung
5.	Viar	BG 2914 AAZ	Umum	BPTP

Kendaraan Roda Dua

1.	Yamaha YT 125	BG. 6292 NZ	Umum	KP. Kayu Agung
2.	Yamaha YT 125	BG. 6293 NZ	Tukiran	BPTP

3.	Yamaha YT 125	BG. 6295 NZ	Joko Usman	BPTP
4.	Yamaha YT 125	BG. 6296 NZ	Pool	BPTP
5.	Yamaha Vega ZR	BG. 2861 AAZ	Ka Balai	BPTP
6.	Yamaha Vega ZR	BG. 2862 AAZ	KSPP	BPTP
7.	Suzuki A100	BG. 5844 NZ	Suklandi	BPTP
8.	Kawasaki Klx 150	F. 3359 B	Pool	BPTP
9.	Honda Vario 150cc	BG 2508 ABA	Kasubag TU	BPTP

E. Keuangan

Sebagai unit pelaksana teknis dibidang pengkajian dan alih teknologi spesifik lokasi, dalam melaksanakan tupoksinya BPTP Sumatera Selatan pada TA. 2022 didukung oleh sumber dana yang berasal dari APBN sebesar Rp 12,473,132,000.00,-

Anggaran BPTP Sumatera Selatan dicairkan sesuai dengan Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2022 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Apabila dana tersebut dirinci menurut jenis belanjanya, maka persentase realisasi belanja pegawai sebesar 97%, belanja barang 99% dan belanja modal 100% seperti pada tabel berikut

Tabel 8. Realisasi penggunaan dana dari DIPA BPTP Sumsel Tahun 2022

No.	Jenis	PAGU (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1.	Belanja Pegawai	4.454.473.000	4,313,300,928	97
2.	Belanja Barang	3,706,050,000	3,683,280,478	99
3.	Belanja Modal	120,000,000	119,584,596	100
	JUMLAH	8,280,523,000	8,116,166,002	98

Realisasi penggunaan dana dari DIPA BPTP tahun 2022 tersebut sebesar 98%.

Tabel 9. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2022

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan	347.070.000,	357.864.000,	0,	357.864.000,	103,11
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0,	20.251.000,	0,	20.251.000,	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.200.000,	1.514.315,	0,	1.514.315,	126,19
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	348.270.000,	379.629.315,	0,	379.629.315,	109,
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi					
425434	Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek	10.500.000,	0,	0,	0,	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4254	10.500.000,	0,	0,	0,	0,
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,	17.217.000,	0,	17.217.000,	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0,	17.217.000,	0,	17.217.000,	Infinity
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	358.770.000,	396.846.315,	0,	396.846.315,	110,61
	JUMLAH PENDAPATAN	358.770.000,	396.846.315,	0,	396.846.315,	110,61

Adapun anggaran dan realisasi dana pada masing-masing kegiatan (kegiatan rutin, penelitian, penunjang penelitian) yang dilaksanakan di BPTP Sumsel terlampir.

F. Penyusunan Laporan Keuangan SAI pada Sekretariat UAPPA/B-W

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Negara, maka diperlukan perangkat hukum yang didasarkan atas prinsip umum yang sehat, modern dan dinamis. Untuk menjawab tantangan tersebut, maka pemerintah telah membuat suatu program Sistem Akutansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang telah diperbaharui untuk memonitor apakah keuangan Negara telah dijalankan secara efektif dan efisien serta telah sesuai dengan tujuan pengeluaran belanja sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA), maka diperlukan informasi yang relevan dalam bentuk laporan-laporan yang seragam untuk seluruh instansi pusat sampai ketinggian satuan unit kerja di daerah.

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang

Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumatera Selatan adalah sebagai penanggung jawab UAKPA, yang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan BPTP berupa laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dengan demikian penyusunan dan penyajian laporan BPTP ini merupakan perwujudan pertanggung jawaban atas penggunaan anggaran maupun barang pada BPTP Sumatera Selatan.

Untuk menunjang pelaksanaan program SAI pada Satuan Kerja dengan mempergunakan Sistem Akutansi Berbasis Akrual (SAIBA) pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan pada tahun 2022 telah dibentuk Unit Akutansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA). Untuk pelaksanaan operasional kegiatan tersebut BPTP Sumatera Selatan telah dilengkapi dengan struktur organisasi dan telah mendapat alokasi dana melalui DIPA Nomor DIPA-018.09.2.567495/2017 tanggal 2 Desember 2016 Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 16.206.590.000.00,- (Enam Belas Milyar Dua Ratus Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

Laporan akhir kegiatan Sistem Akutansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) tahun 2022 ini disusun berdasarkan laporan keuangan satker serta disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah (SAP).

Dari hasil pelaksanaan kegiatan Sistem Akutansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) yang dilaksanakan BPTP Sumatera Selatan untuk tahun anggaran 2017 maka dihasilkan laporan keuangan yang disusun berdasarkan laporan keuangan satker serta disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standard Akutansi Pemerintah. Secara kumulatif, realisasi anggaran pada TA 2022 mengalami kenaikan dibandingkan dengan TA 2018, Pada TA 2022, pencairan anggaran selain belanja pegawai/gaji baru terealisasi pada bulan Februari. Perkembangan pencairan dana dari bulan April hingga Oktober terlihat membentuk garis lurus dengan gradien yang hampir sama, yang berarti pada bulan-bulan tersebut terjadi pencairan anggaran dalam jumlah yang hampir sama. Pada bulan-bulan berikutnya (Nopember dan Desember), pencairan anggaran berlangsung lebih cepat, hingga akhirnya mencapai prosentase realisasi anggaran DIPA Umum sebesar 98%. Angka ini

berdasarkan pencairan anggaran melalui Surat perintah Membayar (SPM) yang Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nya diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palembang.

Peningkatan pencairan dana pada bulan Nopember dan Desember disebabkan transaksi pembayaran belanja modal pada umumnya baru dilaksanakan pada bulan-bulan tersebut. Neraca Semester II 2022 per 31 Desember disusun berdasarkan atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian tahun 2022, dan adanya proses kapitalisasi SIMAK-BMN. Gambaran perkembangan neraca tersebut dapat dilihat sebagai berikut: Posisi Neraca BPTP Sumsel pada Semester II/ 31 Desember 2022 seperti terbaca berikut ini:

Tabel 10. Neraca BMN 2022

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
117131	Bahan Baku	86.745.000,
131111	Tanah	132.111.912.000,
132111	Peralatan dan Mesin	12.719.001.418,
133111	Gedung dan Bangunan	22.260.047.481,
134111	Jalan dan Jembatan	26.508.000,
134112	Irigasi	748.265.000,
134113	Jaringan	14.358.500,
135121	Aset Tetap Lainnya	111.974,
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	135.984.596,
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.673.569.406,)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(4.474.574.629,)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(26.508.000,)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(87.304.492,)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(12.448.000,)
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	18.609.000,
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	4.522.700,
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(17.879.854,)
169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	(4.522.700,)
J U M L A H		152.829.258.588,

Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan telah dapat dilaksanakan/dioperasionalkan sebagaimana mestinya walaupun masih terdapat kendala dan hambatan.

G. Sistem Pengendalian Intern

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun *pilot project* pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) maka diperlukan sistem pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dilaksanakan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan

terhadap peraturan perundang-undangan. SPI diselenggarakan secara menyeluruh baik di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pengawasan Intern (PI) adalah seluruh proses kegiatan audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Sistem pengendalian intern ini dilandasi pada pemikiran bahwa sistem pengendalian intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia untuk memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak. Penyusunan dan pengembangan unsur SPI berfungsi sebagai pedoman penyelenggara dan tolok ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan SPI. Pengembangan SPI perlu mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat (*cost and benefit*), sumber daya manusia, kejelasan kriteria, pengukuran efektivitas dan perkembangan teknologi informasi, serta dilaksanakan secara komprehensif.

Di dalam Undang-undang No. 28 tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 60 Tahun 2008, Kepres No. 80 Tahun 2003, Perpres No. 95 Tahun 2007, Perpres No. 9 Tahun 2005, Perpres No. 20 Tahun 2008, Permentan No. 341/Kpts/OT.140/ 9/2005, dan Permentan No. 12/Permentan/OT.140/2/2007, bahwa Sistem Pengendalian Intern (SPI) harus berjalan sebagaimana yang diindikasikan dan diisaratkan. Sejalan dengan hal tersebut, maka diterbitkan Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumsel Nomor : 054/SK/PW.420/H.12.8/01/2017, tanggal 4 Januari 2017 tentang Pembentukan Tim Sistem Pengendalian Intern di BPTP Sumatera Selatan.

Sebenarnya ada atau tidak ada Satlak SPI, sistem pengendalian intern harus berjalan, karena SPI ada dan melekat pada pimpinan. Keberadaan Satlak SPI hanyalah sebagai "alat", sehingga berjalan atau tidaknya Satlak SPI sangat bergantung kepada komitmen pimpinan, apakah "alat" tersebut mau digunakan atau tidak digunakan.

Sistem Pengendalian Intern bertujuan untuk: (1) Mewujudkan sistem pengendalian intern; (2) Mendorong terlaksananya kegiatan organisasi yang

efisien dan efektif (3) Mendorong terwujudnya kehandalan laporan keuangan; (4) Mendorong terlaksananya pengamanan aset negara; dan (5) Mendorong meningkatnya ketaatan terhadap peraturan perundangan. Sedangkan keluaran yang diharapkan adalah: (1) Terwujudnya sistem pengendalian; (2) Terlaksananya kegiatan organisasi yang efisien dan efektif; (3) Terwujudnya kehandalan laporan keuangan; (4) Terlaksananya pengamanan aset negara; (5) Meningkatnya ketaatan terhadap peraturan perundangan.

Kegiatan Satlak PI BPTP Sumsel pada triwulan-1 tahun 2017 ini, telah melaksanakan beberapa kegiatan yang meliputi pembuatan Surat Keputusan yang diperlukan dalam memulai kegiatan tahun anggaran 2017, pembahasan proposal kegiatan, pemaparan RKT/ROPP/RDHP serta membuat rencana kerja SPI tahun 2022. Masing-masing kegiatan tersebut telah menghasilkan rekomendasi antara lain pelaksanaan masing-masing kegiatan sesuai surat keputusan yang telah dibuat, melakukan penajaman proposal dan perbaikan RKT/ROPP/RODHP. Dilakukan juga persiapan dan pelaksanaan audit BPK-RI, di samping itu, pemantauan yang dilakukan Satlak PI sehubungan dengan awal tahun anggaran, kami mencoba memantau terhadap persiapan pelaksanaan kegiatan yang sangat berkaitan dengan kegiatan perencanaan.

Kegiatan Satlak PI BPTP Sumatera Selatan pada triwulan-II tahun 2022 ini, telah melaksanakan beberapa kegiatan yang meliputi persiapan audit external oleh tim surveillance Masing-masing kegiatan tersebut telah menghasilkan rekomendasi antara lain penerapan sistem mutu di internal organisasi seperti yang tercantum dalam sertifikat ISO 9001, Perbaikan sebagai bukti komitmen isi kebijakan mutu organisasi, penyusunan perencanaan pada sasaran mutu yang ditetapkan di internal organisasi,, dilakukan Penyelesaian Tindak Lanjut BPK terkait dengan temuan BPK diantaranya perapian DBR dan DIR serta penyempurnaan asset-asset yang harus dihenti gunakan untuk dilakukan penghapusan.

Kegiatan Satlak PI BPTP Sumsel pada triwulan-III tahun 2022 ini, telah melaksanakan pengendalian inventarisasi ulang terkait DIR dan DBR pada asept di kantor BPTP Sumsel, PT RPN, KP kayu agung, KP karang Agung. karena selain adanya perpindahan ruangan dan sebagai tindak lanjut BPK dan telah

menghasilkan rekomendasi yaitu segera melakukan penataan kelengkapan dokumen di masing-masing bagian ruangan .

Kegiatan Satlak PI BPTP Sumsel pada triwulan-IV tahun 2022 ini, telah Tindak lanjut LHP Itjen terkait temuan itjen belanja 526, berupa denda keterlambatan dari pihak ketiga.

Tabel 11. Jenis Kegiatan, Ringkasan Hasil, dan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan Satlak PI BPTP SUMSEL Triwulan I Tahun 2022

No	Jenis kegiatan	Ringkasan hasil	Rekomendasi	CATATAN TINDAK LANJUT DARI KEPALA BPTP
1	Pembuatan SK Struktur Organisasi BPTP Sumsel, SK Organisasi Satlak PI, SK Pengelola Keuangan, SK Pengadaan Barang Jasa, SK Pemeriksaan Barang dan Jasa, SK Pengelola Asset, SK penanganan tindak lanjut LHP	Pembuatan SK berdasarkan tupoksi dan kompetensi masing-masing penanggung jawab	Setelah SK dikeluarkan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan kegiatan berdasarkan tugas masing-masing penanggung jawab	Untuk di laksanakan dengan baik
2	Pembahasan proposal	Pembahasan dihadiri oleh semua penanggung jawab kegiatan	Proposal kegiatan dipersempit, agar lebih fokus dalam pelaksanaannya	Untuk dilaksanakan dengan baik dan memperbaiki proposal
3	Pemaparan	Pemaparan dihadiri oleh	Perbaikan	Untuk

	RKTM/ROPP/ RODHP	semua penanggung jawab kegiatan dan tm TPK	RKTM/ROPP/RO DHP agar segera dilakukan	laksanakan dan secepatnya melakukan perbaikan proposal
4	Pembuatan Rencana Kerja SPI tahun 2022	Dilakukan oleh Tim Satlak SPI	Rencana Kerja SPI perlu dukungan penuh dari pimpinan dan pegawai BPTP Sumsel	Untuk dilaksanakan pembuatan rencana kerja berkoordinasi dengan kepala balai

Tabel 12. Jenis Kegiatan, Ringkasan Hasil, dan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan Satlak PI BPTP SUMSEL Triwulan II Tahun 2022

No	Jenis kegiatan	Ringkasan hasil	Rekomendasi	CATATAN TINDAK LANJUT DARI KEPALA BPTP
1	Penyelesaian Tindak Lanjut Irjen terkait dengan temuan Irjen terhadap belanja 526 kegiatan Taman Teknologi Pertanian di Kabupaten Banyuasin	Telah dilakukan penyelesaian penyetoran TGR atas LHP Irjen tahun 2017	Kedepan akan dilakukan perbaikan pengawasan dan pemeriksaan pekerjaan	Di laksanakan dan segera dikoordinasikan dengan Tim SPI

Tabel 13. Jenis Kegiatan, Ringkasan Hasil, dan Rekomendasi Hasil

Pelaksanaan Kegiatan Satlak PI BPTP SUMSEL Tahun 2022

No.	Jenis kegiatan	Ringkasan hasil	Rekomendasi	CATATAN TINDAK LANJUT DARI KEPALA BPTP
1.	Melakukan pengendalian terhadap pengadaan barang dan jasa kegiatan berupa peralatan perkantoran	Pengendalian dilakukan oleh Tim SPI BPTP Sumatera Selatan, dengan melakukan pemeriksaan dan pengendalian.	Untuk mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa .	Untuk segera melakukan percepatan Pengadaan barang dan jasa

Tabel 14. Program Kerja Satuan Pelaksanaan Pengendalian Intern BPTP Sumatera Selatan (Satlak PI BPTP Sumsel) Tahun 2022

No.	Judul Kegiatan	Target Waktu	Keterangan
1	Penetapan SK Struktur Organisasi BPTP Sumsel TA. 2016	Februari	
2	Membentuk struktur organisasi Satlak PI dengan Keputusan Kepala Balai berikut uraian tugas dan fungsinya	Maret	
3	Penyusunan RKTMM	Februari	
4	Penyusunan program kerja PI	April-Mei	
5	Penyusunan juknis PI	Juni	
6	Rapat Koordinasi Pertemuan Rutin Berkala Satlak PI	Juni- November	
7	Penyusunan/penambahan SOP	April	
8	Pengendalian Internal/Audit	Juni- Desember	
9	Monev Ex-Ante dan SPI	Mei dan November	
10	Monev On-Going dan SPI	Maret, Juni,	

		September, Desember	
11	Monev Ex-Post dan SPI	Insidentil	
12	Penyusunan Laporan <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Bulanan • Laporan Triwulan • Laporan Semester • Laporan Tahunan 	September- Oktober	
13	Melakukan penataan arsip yang tertib (bisa dalam hard copy, soft copy, rekaman suara digital, video, dll).	November	
14	Menyiapkan pelaksanaan audit surveillance dan resertifikasi ISO 9001:2015	Juni	
15	Penyelesaian LHP (BPK;Itjen:Lembaga Pemeriksa Lainnya)	Paling lambat dua bulan setelah menerima LHP	
16	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Setiap 6 bulan	

PENUTUP

Atas berkat Rahmat Allah SWT sehingga dapat diselesaikan Laporan Akhir Tahun Kegiatan Subbag Tata Usaha Tahun 2017. Hasil kegiatan yang telah dicapai dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut :

- a. BPTP Sumatera Selatan telah berhasil memenuhi persyaratan ISO 9001:2015
- b. Telah memiliki 1 peta jabatan dengan kekuatan pegawai sebanyak 60 orang (melalui SK Menteri Pertanian No 344/KPTS/KP.010/M/6/2022).
- c. Telah memberikan pelayanan gaji, tunjangan dan tunjangan kinerja bagi 57 orang pegawai dan 19 orang tenaga honor selama 13 bulan.
- d. Jumlah petugas belajar, sebanyak 2 orang, dan 1 orang S3 dan S2 1 orang.
- e. 57 ASN telah membuat Sasaran Kerja Pegawai Tahun 2022 ekinerja.
- f. Telah melaksanakan tindaklanjut LHP inspektorat jenderal
- g. Telah melaksanakan layanan pemeliharaan kantor, gedung dan halaman serta mesin-mesin lain
- h. Mendokumentasikan secara baik surat masuk dan surat keluar dalam dokumen induk
- i. Serapan anggaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 8,116,166,002 atau mencapai 98,00 %
- j. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 396.846.315.

B. SEKSI KERJAMA DAN PELAYANAN PENGAJIAN

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kinerja pembangunan pertanian semakin menunjukkan dampak positif dalam peranannya meningkatkan pendapatan petani. Sebagai agen penghasil teknologi, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian (Balitbangtan) melalui unit kerjanya, dapat berperan penting terhadap keberhasilan program strategis kementerian pertanian, berupa penyediaan teknologi (benih/bibit, varietas, pupuk dan alsintan) (Badan Litbang Pertanian, 2009). Sebagai institusi pusat yang berada di daerah, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumatera Selatan yang menjadi ujung tombak Balitbangtan, berperan aktif dalam menumbuhkan inovasi serta mengembangkan teknologi pertanian spesifik lokasi di daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No.16/Permentan/OT.140/3/2006, BPTP Sumatera Selatan memiliki tugas pokok yaitu: melaksanakan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi. Salah satu fungsi dari BPTP adalah menyiapkan kerjasama, informasi, dokumentasi serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi (BPTP Sumsel, 2011). Dengan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka BPTP Sumatera Selatan menghasilkan paket teknologi pertanian siap pakai, yang dapat menjembatani tujuan pertanian yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah serta keinginan petani.

Pengembangan kerjasama dengan pemerintah daerah maupun swasta sebagai salah satu bagian dari pengembangan *external budget* menjadi salah satu strategi yang mendukung BPTP sebagai *the driving force* dari sistem inovasi termasuk bertindak sebagai integrator antara pola inovasi dan pola agribisnis untuk terciptanya sistem dan usaha agribisnis industrial berdasarkan

pengetahuan dan teknologi yang inovatif dan spesifik lokasi. Kerjasama ini juga harus mengindahkan tupoksi BPTP.

Besarnya tingkat adopsi pengguna, terutama petani, yang selanjutnya diterapkan dalam kegiatan usahatani menjadi salah satu indikator keberhasilan program pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian. Berbagai inovasi yang telah dihasilkan, dapat diterapkan di tingkat petani diawali dengan terbangunnya kerjasama kegiatan, baik antara BPTP dengan pemerintah daerah maupun pihak swasta, serta pemberian pelayanan publik yang akuntabel dan transparan. Dalam melaksanakan kerjasama ini, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mendorong terjalinnya hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan (*win-win solution*) antara BPTP, pemerintah daerah maupun pihak swasta.

Mitra kerjasama di lingkup kerja BPTP Sumsel antara lain mencakup Pemda Dinas lingkup pertanian/peternakan, instansi vertikal lingkup pertanian, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat, Sekolah Menengah dan Perguruan Tinggi, Badan hukum maupun perseorangan di Sumatera Selatan. Hasil kerjasama ini mendukung tugas pokok dan fungsi BPTP berupa data, informasi, teknologi, formula, prototipe dan atau rekomendasi yang dapat digunakan oleh UK/UPT dan atau mitra kerjasama untuk keperluan sendiri sesuai dengan perjanjian. Hasil samping kerja sama penelitian dan pengembangan yang berupa produk dapat dimanfaatkan secara proporsional sesuai dengan perjanjian yang menjadi hak/bagian UK/UPT disetor ke kas negara. Hasil kerjasama penelitian dan pengembangan yang berupa plasma nutfah menjadi milik pemerintah, sedang kepemilikan yang berupa galur/strain/klon/varietas diatur sesuai dengan perjanjian.

Sebagai wujud dalam melaksanakan tupoksinya, selain pelaksanaan kerjasama, BPTP juga memberikan pelayanan kepada publik, pengelolaan kebun percobaan serta pengelolaan website, perpustakaan dan juga laboratorium. Akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap penentuan kebijakan serta modernisasi teknologi informasi komunikasi merupakan syarat tercapainya *good governance*. Tak terkecuali Kementerian Pertanian sebagai Badan Publik, menjadikan transparansi sebagai simbol

keberhasilan dan kesuksesan. Apalagi dengan dikeluarkannya UU NO, 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang merupakan sarana pengawasan dari publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik dalam memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. terkecuali Kementerian Pertanian sebagai Badan Publik, menjadikan transparansi sebagai simbol keberhasilan dan kesuksesan. Apalagi dengan dikeluarkannya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang merupakan sarana pengawasan dari publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik dalam memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. BPTP Sumatera Selatan sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Pertanian yang juga merupakan badan publik, wajib mengikuti UU KIP ini. Salah satunya adalah dengan melakukan pelayanan publik serta memberikan informasi secara terbuka kepada pengguna informasi kecuali informasi yang dikecualikan.

1.2. Dasar Pertimbangan

Pengkajian dalam skala yang terbatas perlu dilakukan terhadap teknologi yang telah dihasilkan baik oleh perorangan maupun lembaga sebelum didiseminasikan kepada pengguna. Pengkajian ini dilakukan untuk mengetahui apakah inovasi tersebut mampu serta diyakini layak untuk meningkatkan produktivitas serta memperbaiki mutu produk. Hasil pengujian yang menunjukkan tidak atau kurang handalnya suatu invensi (jika merupakan hal baru yang belum ada sebelumnya) atau suatu inovasi teknologi, maka perlu dilakukan perbaikan terhadap invensi tersebut atau penolakan terhadap inovasi teknologi karena tidak sesuai dengan kondisi di wilayah atau agroekosistem yang diwakilinya. Oleh karena itu, suatu temuan sebelum disebarluaskan ke pengguna perlu dikaji dalam suatu bentuk kerjasama antara lembaga penemunya dengan pengujinya.

Sebagai salah satu lembaga publik yang melakukan pengkajian dan menghasilkan teknologi pertanian spesifik lokasi, BPTP Sumsel diminta agar dapat lebih mengembangkan potensi yang dimiliki melalui kerjasama dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan pemberian pelayanan yang prima. Hal ini dilakukan dalam upaya menumbuhkembangkan jaringan penelitian guna meningkatkan kemampuan pemanfaatan serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi .

1.3. Tujuan

1. Menghimpun informasi kegiatan yang diperlukan dalam pembangunan pertanian di Provinsi Sumatera Selatan saat ini;
2. Melakukan kerjasama kegiatan yang diperlukan dalam pembangunan pertanian di Provinsi Sumatera Selatan.
3. Memberikan pelayanan prima kepada publik melalui kegiatan PPID, pengelolaan website, kebun percobaan, perpustakaan dan laboratorium.

1.4. Keluaran

1. Diperolehnya nformasi beberapa kegiatan yang diperlukan dalam pembangunan pertanian di daerah saat ini;
2. Diimplementasikannya kegiatan kerjasama dan diperkuat dengan penandatanganan nota kerjasama atau nota kesepahaman antara BPTP Sumsel dengan berbagai stakeholder;
3. Terselenggaranya pelayanan prima kepada publik melalui kegiatan PPID, pengelolaan website, kebun percobaan, perpustakaan dan laboratorium.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pendayagunaan teknologi yang dihasilkan oleh berbagai pihak baik lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, perorangan maupun lembaga lainnya perlu dilakukan secara optimal. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Balitbangtan melakukan penelitian dan pengembangan di sektor pertanian mempunyai tenaga ahli yang mumpuni teknologi maju di bidangnya serta memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Pendayagunaan tenaga, teknologi dan sarana ini perlu dioptimalkan melalui kerjasama, baik dengan perorangan, pemerintah daerah dan pihak swasta baik instansi maupun luar negeri.

BPTP dari awal diarahkan untuk bekerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan pertanian di daerah, terutama pemda setempat, dalam perencanaan dan/atau pelaksanaan kegiatan pengkajian dan diseminasi. Dengan demikian, BPTP diharapkan mampu menghasilkan inovasi pertanian spesifik lokasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, juga memperkuat dan mengembangkan jejaring kerja dengan berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah daerah maupun swasta (Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 2014).

Penyusunan rencana kerja disertai dengan rincian biaya dan pengaturan teknis mengenai pelaksanaan kerjasamanya disusun oleh unit kerja (UK)/UPT bersama-sama dengan mitra kerjasama. Rencana kerja ini dituangkan dalam kerangka acuan atau proposal kerjasama. Naskah perjanjian kerjasama yang disusun memuat hal-hal pengaturan bagi para pihak yang bekerjasama yang mencakup (1). Maksud dan tujuan kerjasama, (2). Ruang lingkup kerjasama, (3). Hak dan kewajiban masing-masing pihak, (4). Jangka waktu kerjasama, (5). Tempat/lokasi kerjasama, (6). Pembiayaan (Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 2006).

Dalam ketahanan pangan nasional, informasi menjadi salah satu hal penting bagi setiap orang. Mendapatkan informasi ialah hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik menjadi sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik. Oleh

karena itu, badan publik wajib memberikan akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat agar masyarakat mendapatkan informasi secara resmi dan lengkap tentang penyelenggaraan pemerintahan melalui berbagai saluran informasi. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Informasi juga menjadi kebutuhan primer dalam pengembangan pribadi dan lingkungan sosial setiap orang sehingga transparansi informasi publik menjadi sarana untuk memaksimalkan publik untuk melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 ini bertujuan untuk: (a) memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; (b) meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas; (c) menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh hak informasi publik; dan (d) menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi. Sehingga percepatan dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dalam rangka upaya strategis mencegah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta terwujudnya sistem pemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk menciptakan keterbukaan informasi publik, Kementerian Pertanian, sebagai lembaga pemerintahan mempunyai komitmen penuh dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik agar dapat diakses oleh masyarakat.

BPTP Sumatera Selatan bertugas untuk melaksanakan penelitian dan pengkajian teknologi pertanian spesifik lokasi di Sumatera Selatan. Keberadaan BPTP di daerah memberikan peluang besar bagi tersedianya teknologi maju guna mendukung pembangunan pertanian yang sesuai dengan kebijakan, keadaan sumberdaya alam dan sumberdaya riset, sosial ekonomi pertanian

serta budaya masyarakat setempat. Disamping itu, masih rendahnya tingkat adopsi teknologi yang telah dihasilkan oleh pelaku agribisnis dapat diantisipasi. Bertitik tolak dari hal tersebut perlu untuk melakukan kegiatan dalam rangka mengembangkan kerjasama, pengkajian, pengembangan dan pemanfaatan hasil Litbang, melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan antar instansi, pengelolaan kebun percobaan, pengelolaan instalasi pengkajian dan pengelolaan pustaka dan website.

III. PROSEDUR

3.1. Ruang Lingkup Kegiatan

Kegiatan Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian BPTP Sumsel Tahun 2022 terdiri dari kegiatan kerjasama dalam negeri serta kegiatan pelayanan pengkajian. Kerjasama dalam negeri terdiri dari:

1. Laporan Kerjasama, Pengkajian, Pengembangan dan Pemanfaatan Hasil Litbang

Ruang lingkup pengembangan kerjasama, pengkajian, pengembangan dan pemanfaatan hasil Litbang meliputi: penjangkaran kerjasama, pelayanan hasil pengkajian dan publikasi (layanan konsultasi teknologi, media tercetak/elektronik), penyelenggaraan seminar (proposal, rutin, dan hasil pengkajian), updating website dan database pertanian/litkaji, menjalin kerjasama penelitian dan pengkajian dengan Pemerintah Daerah Propinsi maupun Kabupaten/Kota, mengidentifikasi kebutuhan teknologi yang dibutuhkan petani dimasing-masing kabupaten, dan sinkronisasi kegiatan yang ada antara BPTP dengan Pemerintah Daerah dan swasta.

2. Pengelolaan PPID

Kegiatan pada Pengelolaan PPID mencakup kegiatan pemberian layanan kepada pemohon/ pengguna layanan baik masyarakat tani, masyarakat umum, pemerintah daerah, swasta, BUMN, dinas/instansi pertanian terkait, mahasiswa/siswa, dan lainnya.

3. Pengelolaan Website/Database/Kepustakaan

Pengelolaan website/database dan kepustakaan meliputi: pelayanan pengunjung, penambahan koleksi buku, pemeliharaan koleksi perpustakaan, pengembangan database dan upload pustaka online serta up-dating website dua kali seminggu.

4. Pengelolaan Instalasi Pengkajian

Pengelolaan laboratorium tanah meliputi pelayanan uji sampel tanah, pupuk dan tanaman.

5. Pengelolaan Kebun Percobaan

Kegiatan pengelolaan kebun percobaan meliputi pengelolaan Kebun Percobaan Kayu Agung dan Kebun Percobaan Karang Agung. Pelayanan yang diberikan terkait pelaksanaan pengkajian, Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS).

3.2. Tempat dan Waktu

Kegiatan kerjasama dan pelayanan pengkajian ini di Provinsi Sumatera Selatan pada bulan Januari – Desember 2022. Kegiatan kerjasama sebagian merupakan kegiatan lanjutan dari tahun sebelumnya dan juga kegiatan kerjasama selama tahun berjalan. Sedangkan kegiatan pelayanan pengkajian yang dilakukan merupakan kegiatan pada tahun 2022.

3.3. Metode Pelaksanaan Kegiatan

- a) Laporan Kerjasama, Pengkajian, Pengembangan dan Pemanfaatan Hasil Litbang
 1. Menjaring kerjasama dengan Pemda, Swasta, Perguruan Tinggi, petani dan masyarakat.
 2. Menyediakan kebutuhan informasi hasil Litkaji dan inovasi pertanian lainnya yang diperlukan *stakeholders* di daerah.
 3. Menyusun dokumen kerjasama dalam bentuk MoU dan mengimplementasikannya serta laporan kerjasama litkaji.
 4. Merespon permintaan *stakeholders* terkait dengan informasi dan atau konsultasi inovasi pertanian baik hasil dari BPTP Sumatera Selatan maupun UK/UPT Badan Litbang Pertanian lainnya.
 5. Menyusun jadwal, topik dan narasumber untuk media tercetak/elektronik.

6. Penyusunan laporan pengembangan kerjasama dan pendayagunaan hasil kegiatan.
- b) Pengelolaan PPID
 1. Memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna layanan BPTP Sumatera Selatan.
 2. Menjaring *feedback* layanan yang digunakan melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
 3. Melakukan analisis terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
 4. Menyusun laporan Pengelolaan PPID.
 - c) Pengelolaan Kebun Percobaan Kayuagung dan Karang Agung
 1. Melakukan kajian spesifik lokasi serta percontohan tanaman pangan dan hortikultura.
 2. Memberikan layanan pengkajian dan informasi teknologi spesifik lokasi.
 3. Memberikan layanan Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS).
 - d) Pengelolaan Website/Database/Kepustakaan
 1. Melayani pengunjung meliputi penelusuran buku, penyediaan data dan informasi, pencatatan (peminjaman dan pengembalian koleksi pustaka).
 2. Mengidentifikasi dan melakukan pemeliharaan koleksi pustaka secara konservasi preventif dan kuratif.
 3. Melakukan up-dating website.
 - e) Pengelolaan Laboratorium Tanah
 1. Melayani jasa analisis tanah dan pupuk secara rutin maupun *cross check* dari Balittanah.
 2. Melakukan sosialisasi dan promosi laboratorium tanah ke *stakeholders*.

3.3. Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan adalah sarana produksi pertanian seperti benih, pupuk, pestisida. Alat yang digunakan selain alat tulis menulis (papan pencatat data, pena, kertas, buku pengamatan) dan

dokumentasi serta peralatan pertanian seperti traktor, pacul, arit, parang, ember, gunting, sprayer dan perlengkapan lapangan (sepatu lapang, topi).

3.4. Pengumpulan dan Jenis Data

Data yang diperoleh dari dinas/*stakeholders* terkait berupa informasi/data primer, didapat melalui pengisian kuesioner Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) oleh pengguna layanan serta wawancara dan diskusi dengan pemangku kepentingan. Data sekunder yang diperoleh dari hasil pelaksanaan kegiatan masing-masing yang diinformasikan kembali melalui laporan kegiatan ini.

3.5. Analisis Data

Analisis data pada laporan kerjasama ini ditampilkan secara deskriptif yang menjabarkan keragaan hasil yang diperoleh. Diangkat berdasarkan analisis yang sudah dilakukan di masing-masing kegiatan

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Kerjasama BPTP Sumatera Selatan

Pada tahun 2022, ruang lingkup kegiatan kerjasama yang telah dilaksanakan oleh BPTP Sumatera Selatan adalah kerjasama dalam negeri yang mencakup kerjasama dengan pemerintah daerah, Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, lembaga masyarakat, universitas dan sekolah kejuruan. Secara spesifik, Kegiatan Kerjasama di tahun 2022 sebagai berikut (Tabel 1).

Tabel 1. Kegiatan Kerjasama BPTP Sumatera Selatan Tahun 2022

No.	Kegiatan	Mitra	Waktu
1.	Sinergi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Layanan dan Pendampingan Teknologi di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan	Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	April 2022 – April 2025
2.	Penempatan Siswa Praktek Kerja Lapangan (PKL) SMK Indosains Palembang	SMK Indosains Palembang	Juli 2022 – Juli 2025
3.	Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan di BPTP Sumsel	SMK Bakti Ibu 3 Palembang	Februari 2022 – Februari 2023
4.	Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan di BPTP Sumsel	Universitas Sriwijaya	Februari 2022 – Februari 2025
5.	Penempatan Siswa Praktek Kerja Lapangan (PKL) SMK Negeri 10 Banyuasin	SMK Negeri 10 Banyuasin	September 2021 – September 2023
6.	Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan di BPTP Sumsel	SMK Xaverius Palembang	Desember 2021 – Desember 2022
7.	Pelaksanaan Pendampingan Penangkaran Jagung Pemerintah Desa Lengkayap	Desa Lengkayap Kecamatan Lengkiti Kabupaten OKU	22 April 2022 s/d 31 Des 2022

Berdasarkan Tabel 1, pada tahun 2022 BPTP Sumsel melaksanakan 7 (tujuh) kerjasama dalam negeri yang mencakup kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Pemerintah Desa Lengkayap serta kerjasama dengan lembaga pendidikan baik universitas maupun sekolah kejuruan. Kerjasama ini sifatnya memuat kerjasama dalam pengkajian, pendampingan teknologi serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia pertanian melalui penerimaan siswa magang/PKL maupun pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Kerjasama yang dilakukan di tahun 2022 ini, sebagian merupakan kerjasama lanjutan yang telah diinisiasi di tahun 2019 dan juga tahun 2021 dan akan berakhir di tahun 2022. Biasanya, kerjasama antara BPTP Sumsel dengan Perguruan Tinggi/Sekolah Kejuruan akan secara kontinu dilakukan perpanjangan setelah masa MoU berakhir. Pada tahun 2022, BPTP Sumsel juga menerima kerjasama dengan SMK Indosains Palembang dan SMK Bakti Ibu 3 Palembang yang notabene buka merupakan sekolah kejuruan pertanian. Namun, para siswa yang diterima untuk melaksanakan magang ini tetap diarahkan sesuai dengan keahlian/keterampilan mereka di sekolah seperti di bidang administrasi keuangan dan perkantoran.

Kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin memuat penyelenggaraan kerjasama mengenai urusan pemerintahan bidang layanan dan pendampingan teknologi. Sedangkan kerjasama yang dilakukan dengan Pemerintah Desa Lengkayap Kecamatan Lengkiti berkenaan dengan pendampingan teknologi perbenihan jagung.

4.2. Pengelolaan PPID

a) Pemohon Informasi Publik

Pemohon Informasi Publik BPTP Balitbangtan Sumsel berasal dari berbagai kalangan, yang terbanyak adalah Peneliti dan Penyuluh, kemudian mahasiswa, siswa dan petani. Tahun 2022 terhitung ada 225 permohonan Informasi publik yang datang langsung ke BPTP Sumsel sebagian besar berasal dari mahasiswa, petugas Penyuluh Pertanian. Informasi dibutuhkan untuk literature dan bahan penyuluhan kepada petani.

Informasi Publik dalam bentuk pemberitahuan telah dilakukan oleh PPID BPTP Sumsel baik melalui media on-line maupun secara langsung. Jumlah

pemohon yang terlayani melalui pemberitahuan via email dan media on-line lainnya adalah sebanyak 25 pemohon. Informasi yang di beritahukan adalah tentang kerjasama antar instansi serta permohonan narasumber.

b) Penolakan dan Penerimaan Layanan.

Sepanjang tahun 2022 tidak terjadi sengketa informasi publik , semua permintaan dapat di penuhi oleh BPTP Balitbangtan Sumsel sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada undang-Undang no 14. Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan ketentun turunannya.

Jumlah pemohon informasi publik di BPTP Sumatera Selatan diklasifikasikan berdasarkan :

1. Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Media Yang Digunakan

Permohonan Informasi publik di BPTP Sumsel dapat dikelompokkan berdasarkan media yang digunakan untuk melaksanakan Informasi publik dengan rincian antara lain, melalui Silayan on-line belum ada, Email sebanyak orang, Whatsapp orang, Telepone orang, SMS belum ada,surat orang, On Visit orang.



49



5



0



16



29



20

Gambar 1. Pengelompokan Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Media yang Digunakan

2. Permohonan berdasarkan Kategori Permohonan

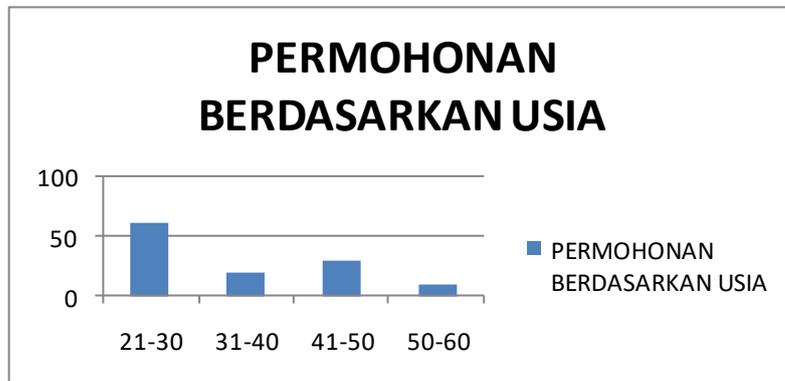
Berdasarkan kategori permohonan permohonan informasi publik ke BPTP Sumsel di kelompokkan menjadi 2 Kategori yaitu permohonan dari Swasta sebanyak 68 orang, dari Institusi pemerintah sebanyak 45 orang, dari organisasi masyarakat sebanyak 20 orang dan dari Mahasiswa Sebanyak 42. Persentasenya secara lebih rinci dapat disimak pada Gambar berikut



Gambar 2. Pengelompokan Pemohon Informasi berdasarkan Kategori Permohonan

3. Jumlah Pemohon Informasi Berdasarkan Usia

Pemohon informasi publik ke BPTP Sumsel di kelompokkan menjadi beberapa kategori usia kategori antara lain kategori umur 15-30 tahun sebanyak 113 orang, 31-45 tahun 90 orang, 46-60 tahun 22 orang. Persentasenya secara lebih rinci dapat disimak pada gambar grafik berikut.



Gambar 3. Pengelompokan Pemohon Informasi Publik berdasarkan Usia

4. Jumlah pemohon berdasarkan Latar Belakang Pekerjaan

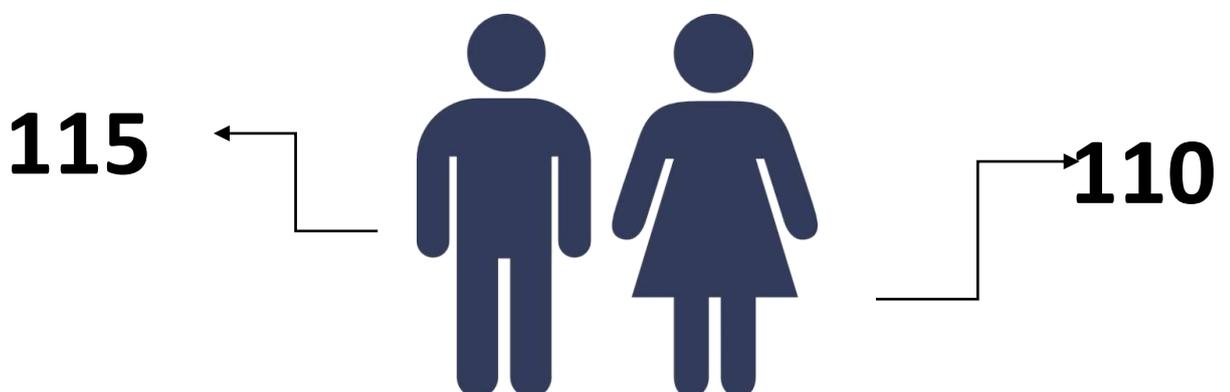
Berdasarkan latar belakang usia pemohon informasi di BPTP Sumsel sebagian besar adalah Mahasiswa 42 orang, Petani 20 orang, PNS 45 orang, Wiraswasta 18 orang, Pegawai Swasta 68 orang,.



Gambar 4. Pengelompokan Pemohon Informasi Publik berdasarkan Latar Belakang Pekerjaan

4. Jumlah Pemohon Informasi Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelaminnya peohon informasi ke BPTP Sumsel terbanyak adalah Perempuan yaitu sebanyak 30 orang dan laki-laki sebanyak 41 orang.



Gambar 5. Pengelompokan Pemohon Informasi Publik berdasarkan Jenis Kelamin

5. Jumlah Pemohon Berdasarkan Tujuan Permohonan

Berdasarkan tujuannya Informasi yang dimohon sebagian besar untuk tujuan mengikuti seminar yaitu sebanyak 24 orang, untuk tujuan Kerjasama penelitian sebanyak 11 orang, permohonan bantuan bibit 8 orang, konsultasi sebanyak 49 orang dan permohonan materi penyuluhan 26 orang.

Sehubungan dengan tugas PPID Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sebagai PPID Pelaksana UPT dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dengan menyediakan sarana, prasarana, fasilitas berupa desk layanan informasi Publik, Layanan Informasi publik melalui website, whatsapp, telephone dan Email. serta menetapkan waktu layanan informasi.

Sarana dan Prasarana

a. Counter Layanan Informasi Publik BPTP Sumsel

Untuk memenuhi dan melayani hak publik dalam mendapatkan informasi. PPID BPTP Sumsel telah menyediakan Counter Layanan Informasi Publik. Counter Informasi Publik menyediakan form layanan dan Dokumen-dokumen informasi publik dalam bentuk tercetak. Pemohon yang datang untuk mengajukan permohonan Informasi Publik diterima terlebih dahulu di Counter Layanan Informasi Publik.



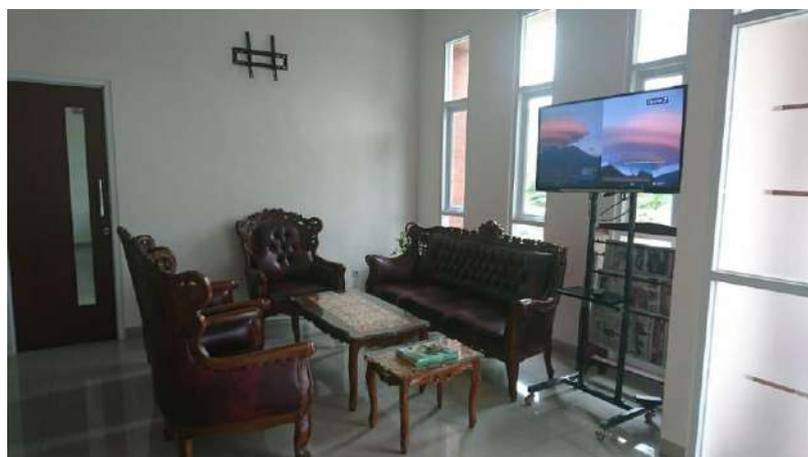
Gambar 6. Counter Layanan Informasi Publik PPID BPTP Sumsel



Gambar 7. Alur Permohonan Informasi Publik PPID BPTP Sumsel



Gambar 8. Maklumat Pelayanan PPID BPTP Sumsel



Gambar 9. Ruang Tunggu PPID BPTP Sumsel



Gambar 10. Kursi roda untuk disabilitas



Gambar 11. Ruang laktasi dan bermain anak



Gambar 12. Tabung Apar untuk kebakaran ringan

b. Layanan On-line

Informasi Publik BPTP Sumsel selain bisa diperoleh dengan datang langsung ke BPTP Sumsel juga dapat di akses melalui media on-line antara lain Website BPTP Sumsel dengan alamat www.sumsel.litbang.pertanian.go.id pada menu Informasi Publik. Selain itu Informasi bisa diperoleh via email dengan alamat bptp-sumsel@litbang.pertanian.go.id atau telepon ke (0711) 410155

Program Kerja Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPTP Sumsel adalah Mendokumentasikan setiap data-data yang telah disusun dalam Daftar Informasi Publik memberikan layanan Informasi kepada publik secara terbuka dan transparan. Baik melalui media on-line, maupun on-Visit. Secara berkala, setiap enam bulan sekali melakukan peningkatan kapasitas SDM petugas layanan Informasi publik.

1. Daftar Informasi Publik

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumsel sesuai yang diamanatkan Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah menyusun daftar Informasi Publik. Daftar Informasi Publik yang ditetapkan di golongkan menjadi tiga kriteria yaitu,

1) Informasi dan dokumen yang dibuka

Merupakan Informasi yang dibuka untuk publik dan langsung bisa diakses melalui media website BPTP Sumsel

- a. Laporan Tahunan BPTP Sumsel,
- b. Laporan Keuangan,
- c. DIPA
- d. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM),
- e. Standar Pelayanan Publik
- f. Lakip
- g. Publikasi Hasil-hasil Pengkajian

2) Informasi dan dokumen yang dimohon,

Merupakan daftar Informasi yang apabila diperlukan oleh pemohon informasi diwajibkan terlebih dahulu mengisi Form Permohonan

Informasi publik. Yang termasuk Daftar Informasi yang diminta antara lain,

- a. Laporan Tahunan kegiatan,
- b. Dokumen Surat Masuk dan Surat keluar,
- c. Dokumen terkait Kerjasama,
- d. Dokumen Keuangan.

3) Informasi dan dokumen yang dirahasiakan

Merupakan daftar Informasi yang dirahasiakan dan tidak dibuka untuk publik. Yang termasuk daftar dokumen yang dirahasiakan adalah

- a. Dokumen terkait data pengkajian yang belum selesai,
- b. Data pribadi pegawai yang bersifat rahasia.

2. Jam Kerja Layanan

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi PPID menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik. Di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumsel dan penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat.

Hari Senin sampai dengan hari Kamis dari jam

- Pagi 08.00 – 16.00 Wib
- Istirahat 12.00 – 13.00 Wib

Hari Jumat

- 08.00 – 16.30 Wib
- Istirahat 11.30 – 13.00 Wib

Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diukur dengan menggunakan 9 (sembilan) indikator yang berkenaan dengan pelayanan yang diberikan BPTP Sumatera Selatan, yakni (1) Persyaratan; (2) Sistem, mekanisme dan prosedur;

(3) Waktu penyelesaian; (4) Biaya/tarif; (5) Produk spesifikasi jenis pelayanan; (6) Kompetensi pelaksana; (7) Perilaku pelaksana; (8) Penanganan pengaduan, sarana dan masukan; (9) Sarana dan prasarana. IKM BPTP Sumatera Selatan Semester I Tahun 2022 diukur dari 93 responden.

Tabel 2. Hasil Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPTP Sumatera Selatan Semester I Tahun 2022

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata Per Unsur	Nilai Rata-Rata Tertimbang Per Unsur
1	Persyaratan Pelayanan	3.38	0.37
2	Prosedur Pelayanan	3.38	0.37
3	Waktu Pelayanan	3.48	0.38
4	Biaya/Tarif Pelayanan	3.53	0.39
5	Produk Pelayanan	3.41	0.37
6	Kompetensi Pelayanan Petugas	3.49	0.38
7	Perilaku Petugas	3.42	0.38
8	Penanganan Pengaduan	3.27	0.36
9	Sarana dan Prasarana	3.33	0.37

Tabel di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan BPTP Sumatera Selatan pada Semester I Tahun 2022 berada pada kondisi baik dengan nilai 84,39. Hal ini menginterpretasikan bahwa BPTP Sumatera Selatan dapat berkinerja dengan baik dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat pengguna. Dilihat dari masing-masing unsur pelayanan, semua unsur pelayanan berada pada kondisi baik sehingga perlu untuk dipertahankan dan bahkan semakin ditingkatkan.

Unsur biaya/tarif pelayanan memberikan nilai IKM yang tertinggi dibandingkan dengan unsur lainnya. Biaya/tarif yang diberikan oleh BPTP Sumatera Selatan untuk pelayanan dalam hal diseminasi informasi adalah gratis. Untuk biaya pelayanan yang dibebankan kepada pengguna adalah dalam hal pengecekan dan analisis laboratorium, pembelian Varietas Unggul Baru (VUBP) dari UPBS yang tarifnya telah disesuaikan dengan PP tarif. Kompetensi pelayanan petugas dan waktu pelayanan juga memiliki nilai IKM yang lebih tinggi dibandingkan unsur lainnya. Menurut persepsi responden, kompetensi dan kemampuan petugas BPTP Sumatera Selatan dalam memberikan pelayanan

adalah berkompeten. Petugas pelayanan berkinerja dengan baik, memiliki pengetahuan dan kemampuan (*skill*) yang baik sesuai bidangnya dalam tugasnya memberikan pelayanan. Waktu pelayanan BPTP Sumatera Selatan dinilai sudah cepat dalam memberikan pelayanan kepada pengguna. Konsistensi dan ketepatan waktu pelayanan ini telah sesuai dengan yang diharapkan. Unsur yang memiliki nilai terendah adalah berkenaan dengan penanganan pengaduan. Hal ini dikarenakan penanganan belum dilakukan karena masih belum ditemukannya pengaduan pelayanan dari pengguna.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan di BPTP Sumatera Selatan, perlu untuk diperhatikan unsur dengan nilai terendah, yakni berkenaan dengan penanganan pengaduan. Namun, unsur-unsur lainnya tetap dipertahankan dan bahkan dapat ditingkatkan kualitasnya agar dapat memberikan pelayanan kepada publik lebih baik dari sebelumnya baik dari sisi kesesuaian persyaratan dan jenis pelayanan, kemudahan prosedur pelayanan, kecepatan waktu pelayanan, kesesuaian produk antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan, kompetensi/kemampuan petugas pelayanan, perilaku petugas terkait kesopanan dan keramahan, kualitas sarana dan prasarana maupun dari sisi penanganan pengaduan penggunaan layanan.

Terdapat 9 (sembilan) indikator yang berkenaan dengan pelayanan yang diberikan BPTP Sumatera Selatan pada penilaiann Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Semester II, yakni (1) Persyaratan; (2) Sistem, mekanisme dan prosedur; (3) Waktu penyelesaian; (4) Biaya/tarif; (5) Produk spesifikasi jenis pelayanan; (6) Kompetensi pelaksana; (7) Perilaku pelaksana; (8) Penanganan pengaduan, sarana dan masukan; (9) Sarana dan prasaran. IKM BPTP Sumatera Selatan Semester II Tahun 2022 diukur dari 108 responden.

Tabel 2. Hasil Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPTP Sumatera Selatan Semester II Tahun 2022

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata Per Unsur	Nilai Rata-Rata Tertimbang Per Unsur	Mutu Pelayanan
1	Persyaratan Pelayanan	3,37	0,37	B
2	Prosedur Pelayanan	3,32	0,37	B
3	Waktu Pelayanan	3,50	0,39	B
4	Biaya/Tarif Pelayanan	3,52	0,39	B
5	Produk Pelayanan	3,39	0,37	B
6	Kompetensi Pelayanan Petugas	3,52	0,39	B
7	Perilaku Petugas	3,44	0,38	B
8	Penanganan Pengaduan	3,29	0,36	B
9	Sarana dan Prasarana	3,35	0,37	B

Tabel 2 menunjukkan bahwa pada Semester II tahun 2022, secara keseluruhan nilai persepsi kepuasan responden terhadap pelayanan yang diberikan BPTP Sumatera Selatan adalah sebesar 84,41 dan dapat disimpulkan bahwa mutu pelayanan BPTP Sumatera Selatan berpredikat B dengan kinerja unit pelayanan baik. Nilai ini sedikit meningkat dibandingkan semester sebelumnya yang menunjukkan bahwa BPTP Sumatera Selatan terus berupaya meningkatkan aspek pelayanannya kepada masyarakat pengguna. Jika dilihat dari masing-masing unsur pelayanan, semua unsur pelayanan BPTP Sumatera Selatan berada pada mutu pelayanan berpredikat B dengan kinerja unit pelayanan baik.

Sama halnya dengan IKM di Semester I, unsur biaya/tarif pelayanan, kompetensi pelayanan petugas dan waktu pelayanan memberikan nilai kepuasan tertinggi dibandingkan 6 (enam) unsur lainnya. Biaya/tarif yang diberikan oleh BPTP Sumatera Selatan untuk pelayanan dalam hal diseminasi informasi adalah gratis. Sedangkan biaya pelayanan yang dibebankan kepada pengguna hanya dalam hal pengecekan dan analisis laboratorium, pembelian Varietas Unggul Baru (VUB) dari UPBS yang tarifnya telah disesuaikan dengan PP tarif. Menurut

pengguna, kompetensi petugas pemberi layanan telah sesuai dengan bidangnya, mampu memberikan layanan dengan baik, memiliki keahlian baik pengetahuan maupun keterampilan yang kompeten dalam bidang pelayanan yang diberikan. Waktu pelayanan BPTP Sumatera Selatan dinilai sudah cepat dalam memberikan pelayanan kepada pengguna. Konsistensi dan ketepatan waktu pelayanan ini telah sesuai dengan yang diharapkan.

Unsur yang memiliki nilai terendah adalah berkenaan dengan penanganan pengaduan. Hal ini dikarenakan penanganan belum dilakukan karena masih belum ditemukannya pengaduan pelayanan dari pengguna. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan di BPTP Sumatera Selatan, perlu untuk diperhatikan unsur dengan nilai terendah, yakni berkenaan dengan penanganan pengaduan melalui perbaikan dan penambahan fasilitas pengaduan serta ketepatan waktu dan upaya jika nantinya ditemukan adanya pengaduan dari masyarakat pengguna. Kedepan, unsur-unsur lainnya tetap dipertahankan dan akan terus ditingkatkan mutu dan kinerja pelayanan agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat baik di semua unsur pelayanan BPTP Sumatera Selatan.

4.3. Layanan Laboratorium

BPTP Sumatera Selatan memiliki fasilitas Laboratorium Kimia Tanah dan Mutu Beras. Terletak di kompleks kantor BPTP Sumatera Selatan, Jl. Kol. H. Burlian KM 6, Palembang, Sumatera Selatan. Laboratorium BPTP Sumsel memiliki instrumentasi yang telah terkalibrasi sehingga dapat meningkatkan nilai kepastian dari pengukuran dan pengujian. Berbagai jenis pengujian yang dapat dilakukan di Lab. Kimia Tanah BPTP Sumsel, Analisa Kimia Tanah rutin diantaranya:

1. Preparasi Sampel Tanah
2. Tekstur 3 Fraksi (Pasir, debu dan liat)
3. Kadar NPK
4. Pengukuran C- Organik
5. Pengujian Kapasitas Tukar ION (KTK)
6. Pengujian kadar mineral

Selain Itu Laboratorium BPTP Sumsel juga melayani jasa pengujian untuk mutu beras dengan metode yang telah terstandar oleh SNI 6128-2015, adapun parameter uji pada mutu beras adalah sebagai berikut :

1. Derajat Sosoh
2. Butir Merah
3. Butir Patah
4. Butir Gabah
5. Kadar Air
6. Butir Kuning/Rusak
7. Butir Patah
8. Beras Kepala
9. Butir Kapur
10. Butir Menir



Gambar 13. Kalibrasi Instrumen Oven dan pH Meter Pada Laboratorium BPTP Sumsel

4.4. Pengelolaan Kebun Percobaan

4.4.1. Pengelolaan Kebun Percobaan Kayuagung

Berikut uraian kegiatan pengelolaan Kebun Percobaan Kayuagung yang telah dilaksanakan pada tahun 2022:

1. Pengelolaan unit pembibitan ayam KUB dan ayam Sensi hasil litkaji Balitbangtan, yang terdiri atas unit Kandang indukan 20x8 meter dimana terdapat \pm 200 ekor indukan dan 40 ekor pejantan, unit penetasan yang

memiliki 2 unit mesin tetas kapasitas total 2.700 telur yang tengah menghasilkan telur tetas sejak bulan April 2022. Hasil akhir kegiatan berupa DOC ayam KUB sebanyak 8.750 ekor yang telah tersalurkan pada peternak dan instansi di Sumatera Selatan.

2. Budidaya Padi dan jagung pada lahan lebak yang sudah di revitalisasi pada thn 2020 sampai thn 2022 seluas \pm 4,5 ha (dangkal) dan \pm 5 ha (tengahan), telah dihasilkan padi dan jagung untuk benih dan konsumsi.
3. Kegiatan Penelitian padi percobaan Uji Daya hasil lapang galur, Uji Multi lokasi, Uji Galur dan Uji Varietas baru kerjasama dengan Balai Besar Padi Sukamandi, yang dilaksanakan pada musim tanam bulan April 2022.
4. Model budidaya jamur merang (*Volvariella volfaceae*) pada media tandan sawit kosong didalam kumbung/ kandang budidaya jamur.
5. Koleksi tanaman Sumberdaya genetic lokal berupa Duku Varietas Palembang, manggis sukaraja, durian bakul, ternak itik pegagan, sarana Bibit Induk/ KBI untuk mendukung Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari M-KRPL Sumsel.

Kegiatan revitalisasi lahan telah dilakukan untuk mengelola tata air rawa lebak dengan pembuatan saluran pembuangan air dari lahan menuju sungai alam, normalisasi sungai yang melintasi lahan, saluran sekunder dan tersier serta pengaturan petakan pada lahan dangkal. Dengan revitalisasi lahan rawa lebak ini telah berdampak positif pada kegiatan di KP Kayuagung, dimana budidaya padi, jagung dan penelitian padi dapat dilaksanakan kembali setelah 4 tahun terakhir tidak dapat dilaksanakan.

4.4.2. Pengelolaan Kebun Percobaan Karang Agung

a) Pemeliharaan Sawah Pasang Surut

Kegiatan pengelolaan Kebun Percobaan Karang Agung melakukan penanaman padi seluas 10 ha yaitu varietas Inpari 30, Inpari 32 dan Inpari 43 yang yang berasal dari Balai Besar Penelitian Padi Sukamandi dan UPBS BPTP Sumatera Selatan.

Tabel 2. Varietas Padi di KP Karang Agung MT 1 2022

Varietas/ Galur	Jumlah Luas Tanam	Tgl Tanam	Umur Padi/ Hari	Hasil Panen GKP/ Kg
Inpari 30	10.000 m ²	9 Januari 2022	110-120	1.000
Inpari 32	60.000 m ²	16 Januari 2022	110-120	2.400
Inpari 43	30.000 m ²	2 Januari 2022	110-120	6.000
Jumlah	100.000 m ²			

Pertumbuhan tanaman pada awal masa vegetatif cukup baik, akan tetapi pertumbuhan mengalami serangan tikus pada masa vegetatif dan generatif. Dari hasil ubinan tertinggi mencapai 3 ton/ha yaitu varietas Inpari 43. Sedangkan yang terendah, yakni Inpari 32 hanya mencapai 0,5 kg/ ton/ha. Dari beberapa varietas padi yang ditanam mendapat hasil 9.400 kg gabah konsumsi. Rendahnya hasil panen pada tabel 1 secara keseluruhan disebabkan serangan hama tikus.

Tabel 3. Varietas Padi di KP Karang Agung MT 2 2022

Varietas/ Galur	Jumlah Luas Tanam	Tgl Tanam	Umur Padi/ Hari	Hasil Panen GKP/ Kg
Inpari 30	40.000 m ²	9 Juni 2022	110-120	2.000
Inpari 32	60.000 m ²	9 Juni 2022	110-120	600
Jumlah	100.000 m ²			

Pertumbuhan tanaman pada awal masa vegetatif cukup baik, akan tetapi pertumbuhan mengalami gangguan akibat kekurangan hara disebabkan dosis pemupukan yang diberikan tidak sesuai dengan dosis anjuran dan pada fase generative mengalami serangan hama tikus, burung dan walang sangit. Disamping itu, berdasarkan data Yuliana (2012), menunjukkan bahwa kadar pirit (FeS_2) yang ada di dalam tanah daerah Karang Agung cukup tinggi dan meningkat dengan kedalaman tanah. Pada kedalaman kurang kurang dari 41 cm

kadar pirit berkisar antara 0.05% - 0.08%, sedangkan mulai kedalaman 41 cm kadar pirit berkisar antara 2.72% - 5.02%.

Fe merupakan salah satu hara esensial bagi tanaman; berfungsi sebagai penyusun klorofil dan kofaktor enzim, berperan dalam perkembangan kloroplas, serta berperan penting dalam transfer elektron pada proses respirasi. Karenanya, kekurangan Fe menyebabkan terhambatnya pembentukan klorofil dan tidak optimalnya fungsi beberapa enzim. Dari aspek kebutuhan, Fe merupakan hara mikro bagi tanaman, terkandung secara normal pada jaringan tanaman dalam kisaran 100-200 ppm. Pada kadar lebih dari 300 ppm, keberadaan Fe dapat menyebabkan keracunan pada tanaman, khususnya tanaman padi.

Keracunan Fe pada tanaman padi terjadi karena Fe^{2+} yang berlebih dapat mengganggu proses-proses metabolisme dan menyebabkan kerusakan pada tanaman, ditandai dengan adanya daun yang berkarat (gejala bronzing), struktur kaku dan berwarna coklat, serta sistem perakaran yang kurang berkembang. Umumnya, konsentrasi Fe^{2+} pada kisaran 1.000-2.000 ppm di dalam tanah dapat mempengaruhi produksi padi sawah

Kadar Fe jaringan tanaman padi menunjukkan semakin tinggi kadar Fe dalam larutan semakin tinggi kadar Fe dalam jaringan tanaman padi, hal ini sejalan dengan pengamatan skor toksisitas Fe pada tanaman yang semakin meningkat. Toksisitas Fe pada padi disebabkan tingginya kadar Fe dalam jaringan tanaman, yang berbeda-beda tergantung varietas atau kepekaan tanaman. Menurut hasil penelitian Nozoe et al. (2008) menunjukkan bahwa batas kritis toksisitas Fe pada tanaman padi berkisar antara 500-2,000 ppm Fe.

Potensi galur harapan yang pernah diuji di KP Karang Agung dan wilayah Karang Agung Ulu berkisar antara 0.33 – 2.17 ton/ha berdasarkan hasil penelitian Sabran *et al* (2000) yang menguji 16 varietas galur harapan. Dimana setiap galur harapan yang diuji memiliki karakteristik toleransi terhadap keracunan Fe yang berbeda.

b) Pemeliharaan Kebun Kelapa Sawit dan Kelapa Hibrida

Pemeliharaan kelapa sawit seluas 6 ha terdiri dari 272 batang usia produktif (TM) dan 544 batang usia non produktif (TBM) serta 60 batang yang berumur 30 tahun berupa tanaman pagar dan masih produktif, masih memerlukan pemeliharaan, pembuatan surjan dan penyulaman tanaman yang mati karena diserang hama. Dari hasil panen 60 batang selama kurun waktu 1 tahun (2022) diperoleh hasil 10.800 kg tandan buah segar/ TBS.

Pemeliharaan kelapa hibrida sebanyak 40 batang dilakukan dengan penyemprotan herbisida, membersihkan pelepah dan pemupukan. Dari jumlah 40 batang, yang masih produktif 25 batang dan diperoleh hasil 1.000 butir atau 500 kg.

c) Pemeliharaan Kebun Sayuran

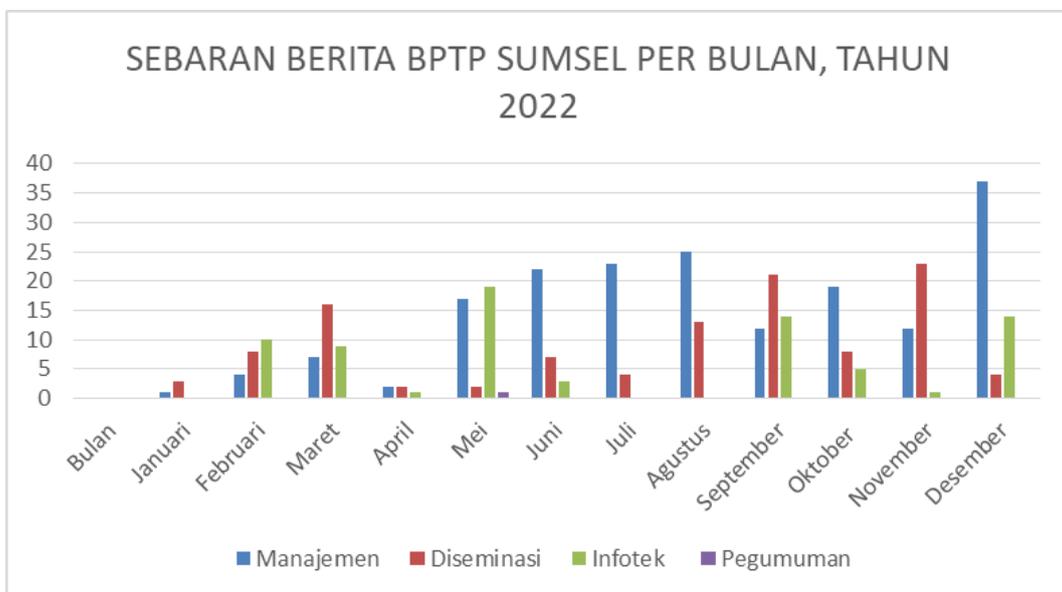
Kebun Pengelolaan sayuran ini dilakukan dengan tujuan utama untuk mendapatkan produk bahan pangan dengan cara menggunakan sumber daya tanaman yang sebelumnya sudah ditanam. Sayuran yang ditanam antara lain: sayur bayam, sayur kangkung, seledri, tomat, cabai, dan terong. Luas areal kebun sayuran \pm 0.25 ha.

d) Kendala Umum

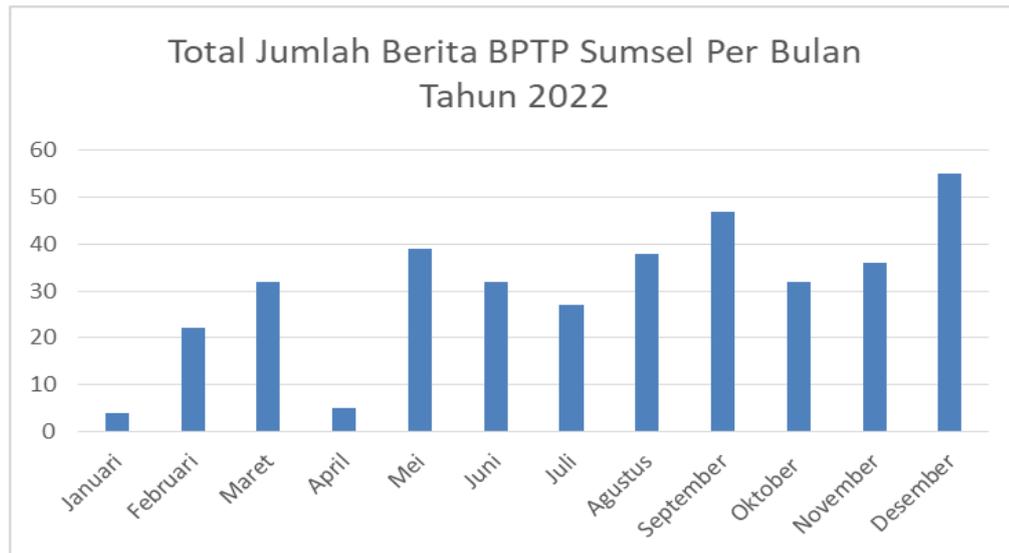
Permasalahan utama yang dihadapi dalam kegiatan Pengelolaan/Pemberdayaan IP2TP di Kebun Percobaan Karang Agung yang termasuk dalam tipologi lahan rawa pasang surut adalah kondisi banjir adalah fluktuasi pasang surut yang diperparah dengan kondisi infrastruktur saluran sekunder dan tersier yang sudah tidak berfungsi normal. Hal ini menyebabkan lamanya masa kering yang sukar diprediksi dan sulitnya menahan air pasang yang menyebabkan pasang di lahan > 6 jam. Selain itu, juga masalah sosial ekonomi meliputi: pemasaran hasil, keterbatasan modal dan tenaga kerja yang memiliki kemampuan dan saran produksi berupa alat mesin pertanian yang tidak memadai.

4.5. Pengelolaan Website dan Perpustakaan

Pada tahun 2022, jenis berita BPTP Sumsel yang disampaikan melalui website terdiri dari kegiatan manajemen, diseminasi, infotek dan pengumuman dengan total sebaran berita sebanyak 369 berita. Berita terkait manajemen dan infotek terbanyak di tahun 2022 dibandingkan dengan kegiatan infotek dan pengumuman. Berita kegiatan manajemen yang diposting di website BSIP pada tahun 2022 adalah sebanyak 181 berita (49,05%), sedangkan berita mengenai kegiatan infotek sebanyak 111 berita (30,08%). Dilihat dari sebaran per bulannya (Gambar 1 dan 2), jumlah postingan berita di bulan Desember dan September tertinggi dibandingkan bulan-bulan lainnya. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya kegiatan manajemen yang dilakukan oleh balai memasuki Triwulan ke 3 dan 4. Sedangkan kegiatan diseminasi memiliki tren yang hampir sama di setiap bulannya dikarenakan kegiatan diseminasi ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh balai setiap bulannya dengan jumlah berita terbanyak adalah di bulan Maret, September dan November.



Gambar 1. Sebaran Berita BPTP Sumsel Per Bulan Tahun 2022



Gambar 2. Total Berita BPTP Sumsel per Bulan Tahun 2022

Perpustakaan adalah salah satu bagian di bawah unit kerja yang berfungsi untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola dan mengatur koleksi bahan pustaka secara sistematis untuk digunakan oleh pemakai sebagai sumber informasi sekaligus sarana belajar yang menyenangkan. Saat ini, teknologi dan informasi atau ICT (*Information Communication and Technology*) telah menjadi kebutuhan sehari-hari. Sehingga setiap institusi, termasuk perpustakaan, berusaha untuk mengintegrasikan ICT guna membangun dan memberdayakan sumberdaya manusia agar dapat bersaing dalam era globalisasi. Perkembangan ICT ini melahirkan perpustakaan berbasis digital menggunakan komputer. Perpustakaan digital secara ekonomi lebih menguntungkan dibandingkan dengan perpustakaan biasa.

Pada tahun 2022, pengelolaan perpustakaan pada BPTP Sumatera Selatan tetap menggunakan informasi dan teknologi guna memberikan pelayanan informasi terbaik kepada pengguna. Kegiatan utama di dalam pengelolaan perpustakaan ini mencakup: (1) Registrasi bahan pustaka; (2) Pelabelan bahan pustaka dan (3) Pengaturan tata letak bahan pustaka. Bahan pustaka baru telah diregistrasi hingga siap baca. Melalui pengelolaan perpustakaan yang baik, pelayanan informasi dapat diberikan secara cepat sehingga memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi pengguna.

VIII. PERSONALIA

8.1. Tenaga yang terlibat dalam kegiatan

No	Nama/NIP	Jabatan dalam Kegiatan	Uraian Tugas	Alokasi Waktu (Jam/Minggu)
1.	Dr. Suharyanto, SP, MP NIP.	Pengarah/ Ka.Balai	Mengarahkan dalam pembuatan ROKTM dan Nasumber pada kegiatan	3
2.	drh. Aulia Evi Susanti, M.Sc/ NIP. 19830402 200801 2 016	Penjab RKTm/ Kasie. KSPP	Membantu mengarahkan dalam pembuatan ROKTM dan Nasumber pada kegiatan	3
3.	Herwenita, SP/ NIP. 19850117 200901 2 005	Penanggung jawab ROKTM	Mengkoordinir kegiatan mulai dari pembuatan ROKTM hingga pelaporan	4
4.	Yuana Juwita, SP NIP. 19830911 200912 2 004	Anggota tim	Peliput data/ informasi	3
5.	Anissa, SP NIP. 19781118 201101 2 005	Anggota tim	Peliput data/ informasi	3
6.	Maya Dhanisa Sari, SP NIP. 19830629 200912 2 005	Anggota Tim	Peliput data/ informasi	3
7.	Yayan Suryana, SP NIP.19781118 201101 2 005	Pelaksana	Peliput data/ informasi	3

8.	Juwedi NIP. 19690919 200701 1 001	Pelaksana	Pelaksana lapang	3
9.	Lince Sitorus, SE NIP. 19710606 199403 2 002	Administrasi	Pelaksana administrasi dan keuangan	3

C. KEGIATAN PERBENIHAN

Varietas unggul merupakan inovasi teknologi utama dari Badan Litbang Pertanian yang berperan sangat dominan dalam meningkatkan produktivitas padi. Manfaat dari keunggulan suatu varietas padi, yang telah dilepas oleh para pemulia tanaman akan dapat dirasakan, baik oleh produsen padi maupun konsumen beras bila tersedia benih bermutu dari varietas tersebut dalam jumlah yang mencukupi untuk ditanam oleh petani dalam skala luas. Berkaitan dengan hal tersebut, keberadaan sistem perbenihan yang kokoh (produktif, efisien, berdaya saing, berkelanjutan) diperlukan untuk mendukung upaya peningkatan produksi dan mutu produk pertanian.

Kegiatan Produksi Benih untuk Mempercepat Diseminasi varietas unggul baru (VUB) di Sumatera Selatan dilakukan di Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan pada MT. 2022. Tujuan dari kegiatan: i) Menghasilkan benih sumber padi banyan 5 ton FS, agar selalu terjamin ketersediaannya sesuai dengan kebutuhan pengguna, ii) mempercepat pengembangan dan penyebarluasan varietas unggul baru (VUB) yang mampu meningkatkan produksi, produktivitas, dan mutu hasil, dan iii) melakukan pembinaan dan pendampingan kelompok penangkar/penangkar benih. Kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan teknologi baku/standar agar mutu benih yang dihasilkan terjamin serta menggunakan pendekatan partisipatif dan pengawalan teknologi. Data yang dikumpulkan pada kegiatan Produksi Benih untuk Mempercepat Diseminasi varietas unggul baru (VUB). Pertumbuhan tanaman diamati secara visual dengan memperhatikan gejala tumbuh tanaman/hasil diamati berdasarkan hasil panen masing-masing varietas dan waktu tertentu. Data yang akan dikumpulkan meliputi keragaan pertumbuhan, produksi benih dan persepsi petani. Jenis data meliputi data kuantitatif dan juga kualitatif ditabulasikan dan dianalisis secara deskriptif. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pengamatan persentase tumbuh benih di persemaian rata-rata untuk semua varietas memberikan persentase tumbuh yang baik yaitu diatas 95%. Secara visual pertumbuhan tanaman padi pada fase vegetatif di lapanga cukup baik untuk varetas Inpari 42 maupun Inpari Nutri Zinc. Produksi benih sumber padi Foudation Seed (FS) 5 ton yang sudah disertifikasi pada tahun 2022 milik UPBS BPTP Sumatera Selatan adalah

varietas Nutri Zinc sebanyak 2.500 kg. Pendampingan pada 2 (dua) kelompok penangkaran benih padi di kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur.

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur) memiliki luas sebesar 3.370 Km², dimana sebagian besar dari wilayah tersebut adalah dataran rendah dan cenderung rata kecuali di wilayah Kecamatan Martapura dan sekitarnya yang cenderung berbukit. Secara geografis terletak pada 1030 40' Bujur Timur – 1040 33' Bujur Timur dan 30 45' Lintang Selatan – 40 55' Lintang Selatan.

Secara administrasi wilayah Kabupaten OKU Timur memiliki batas-batas sebagai berikut : di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir (Kecamatan Tanjung Lubuk dan Lempuing) dan Kabupaten Ogan Ilir (Kecamatan Muara Kuang), di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir (Kecamatan Lempuing dan Kecamatan Mesuji), di sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Lampung (Kabupaten Way Kanan) dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Kecamatan Simpang) dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu (Kecamatan Lengkiti, Sosoh Buay Rayap, Baturaja Timur dan Peninjauan).

Topografi dan ketinggian di wilayah Kabupaten OKU TIMUR berkisar antara 35 – 67 meter di atas permukaan laut. Bentuk lapangan (topografi), keadaan tanah di wilayah Kabupaten dapat digolongkan ke dalam wilayah datar (*penepain zone*), bergelombang (*piedmont zone*) dan berbukit (*hilly zone*).

Curah hujan yang terjadi dapat dipengaruhi oleh kondisi iklim, kondisi geografis dan perputaran arus udara. Akibatnya jumlah curah hujan yang tercatat dimasing-masing stasiun pengamatan ataupun BPP/BIP tidak sama. Sebagai akibat dari letak geografis dan kondisi topografis wilayah yang berbukit–bukit, maka berdasarkan klasifikasi iklim menurut Schmidt dan Ferguson, daerah Kabupaten OKU TIMUR tergolong tipe iklim C dengan tingkat kelembapan 60 – 70 %. Jumlah bulan basah 3,6 dan bulan kering 3,2 dengan rata – rata dimulai dari bulan Oktober dan berakhir pada bulan Juli.

Kondisi iklim di Kabupaten OKU TIMUR termasuk tropis basah dengan variasi curah hujan antara 2.554 – 3.329 mm/tahun. Bulan terkering adalah bulan Juli dengan curah hujan sekitar 280 mm. Periode kering antara bulan Mei –

Agustus dengan curah hujan antara 113 – 175 mm. Suhu bervariasi dengan rata-rata 22 – 31°C. Angin bertiup antara 15 – 20 km/jam. Ditinjau dari jumlah hari hujan menurut data yang diperoleh dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten OKU TIMUR pada tahun 2010 jumlah hari hujan berkisar antara satu hingga 11 hari, dengan rata-rata setiap bulannya sebanyak 5,67 hari.

Luas lahan sawah dan target tanam (Oktober-Maret) di Kabupaten OKU Timur mencapai 73.420 hektar. Apabila jumlah pemakaian benih ditingkatkan petani rata-rata 25 kg/ hektar maka kabupaten OKU Timur membutuhkan benih sebanyak 1.835,500 ton. Jenis varietas yang dikembangkan petani penangkar di kabupaten OKU Timur masih sangat beragam, seperti Ciliwung, Mekongga, Inpari 6, Inpari 33, Inpari 43, dan Inpari 30, namun yang paling dominan adalah varietas Mekongga dan Ciliwung.

Luas lahan panen mencapai 104.905 ha, naik menjadi 105.972 ha dengan jumlah gabah produksi mencapai 617.943 ton gabah kering panen (GKP). Artinya per hektar lahan padi memproduksi 5.91 ton. Kecamatan penghasil padi terbesar di kabupaten ini adalah Kecamatan Buay Madang Timur, Kecamatan Semendawai Suku III dan Kecamatan Buay Madang.

4.2. Peran Penangkar dalam Menunjang Perbenihan

Usaha penangkaran benih padi menjadi salah satu usaha produktif dari beberapa kegiatan yang dilakukan kelompok tani. Dalam memproduksi benih padi, kelompok tani Penangkar bekerjasama dengan anggota tani, dan Balai Pengawas dan sertifikasi benih provinsi Sumatera Selatan dengan menerapkan teknologi PTT padi antara lain: 1) olah tanah sempurna, 2) bibit muda kurang dari 21 hari, 3) 1-3 bibit per lubang, 4) pemupukan yang berimbang, 5) pengairan basah kering dan 6) pengendalian gulma dan OPT yang optimal, dan 7) adanya kegiatan roguing oleh kelompok tani atas bimbingan BPSB dan BPTP Sumsel.

Salah satu syarat benih bermutu adalah tingkat kemurnian genetik yang tinggi, oleh karena itu roguing perlu dilakukan dengan tujuan membuang rumpun-rumpun tanaman yang ciri-ciri morfologisnya menyimpang dari ciri-ciri varietas yang diproduksi benihnya. Adapun prosedur kegiatan penangkaran VUB padi,

mulai dari persemaian, tanam, pemeliharaan sampai panen dan pasca panen selalu berkoordinasi dengan BPSB (Tabel 1).

Benih sumber yang digunakan untuk untuk pertanaman produksi benih satu kelas lebih tinggi dari kelas benih yang akan di produksi. Untuk memproduksi benih kelas FS (Foundation Seed/ Benih Dasar/BD) atau label putih, maka benih sumbernya adalah benih padi kelas BS (Breeder Seed/ Benih Penjenis/BS) atau Label Kuning, sedangkan untuk memproduksi benih kelas SS (Stock Seed/Benih Pokok/BP) atau benih sumbernya Label Ungu, maka benih sumbernya boleh FS atau boleh BS dan untuk memproduksi benih kelas ES (Extension Seed/Benih Sebar/BR) benih sumbernya dari benih kelas SS atau FS.

Tabel 1. Prosedur penangkar benih padi sawah

No	Uraian Kegiatan	keterangan
1	Mengajukan permohonan dengan kelas benih untuk penangkaran (BD, BP, BR)	Koord BPSB, lampirkan sertifikasi benih
2	Menentukan tanggal semai, tanggal tanam	Koord BPSB
3	Pemeriksaan I (Umur 1 bulan)	BPSB + Kelompok tani +BPTP
4	Pemeriksaan II (Umur Primordia)	BPSB + Kelompok tani + BPTP
5	Pemeriksaan III (Keluar Malai) + Rouging	BPSB + Kelompok tani +BPTP
6	Penentuan Waktu Panen	BPSB + Kelompok tani
7	CBKS (Calon Benih Kering Sawah)	Kelompok tani
8	Proses menjadi calon benih	Kelompok tani
9	Uji Laboratorium	BPSB
10	Keluar Draft Sertifikat	BPSB
11	Cetak Label + Packing	Kelompok tani

Benih sumber yang digunakan untuk untuk pertanaman produksi benih satu kelas lebih tinggi dari kelas benih yang akan di produksi. Untuk memproduksi benih kelas FS (Foundation Seed/ Benih Dasar/BD) atau label putih, maka benih sumbernya adalah benih padi kelas BS (Breeder Seed/ Benih

Penjenis/BS) atau Label Kuning, sedangkan untuk memproduksi benih kelas SS (Stock Seed/Benih Pokok/BP) atau benih sumbernya Label Ungu, maka benih sumbernya boleh FS atau boleh BS dan untuk memproduksi benih kelas ES (Extension Seed/Benih Sebar/BR) benih sumbernya dari benih kelas SS atau FS.

Benih pokok diproduksi oleh produsen atau penangkar benih. Pengendalian mutunya melalui sertifikasi oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB). Pengawasan mutu benih memiliki peranan utama dalam produksi benih. Semua tahapan dari perbanyakan benih, pengolahan dan penyimpanan sampai kepada distribusi dan pemasaran harus dilakukan pengawasan, meliputi (1) pengujian mutu, (2) pengawasan, (3) peraturan dan (4) sertifikasi.

Keberhasilan pengembangan varietas unggul ditentukan oleh berbagai aspek, terutama ketersediaan benih dan mutu benih itu sendiri. Penggunaan benih bermutu tinggi merupakan prasyarat utama dalam budi daya padi. Oleh karena itu, pengembangan varietas unggul menuntut penyediaan benih yang bermutu tinggi dalam jumlah yang cukup dan tersedia tepat waktu. Sistem jalur benih antar lokasi dan antar musim (Jabalsim) seperti pada kedelai dapat pula dijalankan pada padi yang akan berperan penting dalam penyediaan benih dari satu musim ke musim berikutnya dan antar petani bahkan lokasi. Sehingga risiko menurunnya daya tumbuh benih dapat dihindari dan sumber benih dekat dengan lokasi pengembangan padi. Ke depan, untuk memenuhi kebutuhan benih padi yang tepat varietas, tepat jumlah, tepat mutu, tepat tempat, dan tepat waktu, sistem Jabalsim perlu dikembangkan melalui pembinaan para penangkar benih atau dalam sistem produksi benih berbasis komunitas (*community-based seed production*).

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan melalui Unit Penangkaran Benih Sumber yang melakukan pertanaman di lokasi petani ini sudah menginisiasi terbentuknya kelompok penangkar benih. Beberapa upaya pembinaan telah dilakukan ke kelompok tersebut melalui pertemuan kelompok yang dihadiri juga oleh penyuluh dan petugas BPSB. Selain pertemuan tersebut juga dilakukan pelatihan. Pelatihan yang diberikan diutamakan untuk memberikan pemahaman kepada kelompok tersebut tahapan dalam

memproduksi benih dan bagaimana prosedur untuk memperoleh sertifikasi benih dari BPSB.

4.3. Implementasi Kegiatan UPBS

Lokasi kegiatan UPBS dilakukan di lahan irigasi di desa Sidomulyo, Kecamatan Belitang III, Kabupaten OKU Timur, dengan luas 4 hektar, varietas yang digunakan Inpari 42 dan Inpari Nutri Zinc. .

4.4. Keragaan varietas

4.4.1. Fase vegetatif

Keragaan pertanaman padi di persemaian lahan irigasi sampai umur 21 hari menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik untuk semua varietas, dimana daunnya berwarna hijau dan pertumbuhannya cukup seragam. Pengamatan persentase tumbuh dilakukan 15 hari setelah benih ditanam. Secara rata-rata semua varietas memberikan persentase tumbuh yang baik yaitu diatas 95%

Pelaksanaan tanam dilakukan secara bertahap, mengingat luasan yang ditanam untuk produksi benih FS seluas 4 (empat hektar), sehingga ada perbedaan waktu tanam. Untuk Produksi Benih FS varietas yang digunakan adalah Varietas Inpari Nutri Zinc dan Inpari 42. Keragaan tanaman padi kedua varietas tersebut pada fase vegetatif (umur 10-14 hari setelah tanam), secara visual pertumbuhannya cukup baik.

Tanaman yang tumbuh baik mampu menyerap hara dalam jumlah yang banyak. Ketersediaan hara di tanah berpengaruh terhadap peningkatan aktivitas fotosintesis tanaman, sehingga akan meningkatkan pertumbuhan dan komponen hasil tanaman. Sifat genetik dengan daya adaptasi tinggi dapat memberikan pertumbuhan yang maksimum, namun sebaliknya varietas yang mempunyai daya adaptasi rendah akan memberikan pertumbuhan lebih kecil (Rahman&Fattah. 2013). Keragaan genetik antara populasi menghasilkan ekspresi genetik yang beragam pula. Taryat, *et al*, 2000, menyatakan bahwa perbedaan masa pertumbuhan total pada fase vegetatif, lebih dipengaruhi oleh sifat genetik atau bergantung pada sensitifitas dari varietas yang dibudidayakan terhadap lingkungan.

4.4.2. Fase Generatif

Keragaan Fase vegetatif pada kegiatan produksi benih sumber FS 5 ton disajikan pada tabel 2.

Tabel 2. Keragaan komponen hasil dan hasil rata-rata padi pada kegiatan produksi benih sumber Padi FS Tahun 2022

	Varietas	Tinggi tanaman (cm)	Jumlah anakan (batang)	Panjang Malai (cm)	Gabah Isi/malai (butir)	Hasil GKP (ton/ha)
1	Inpari 42	106,8	24,2	24,5	218,6	6,6
2	Inpari Nutri Zinc	99	24,4	24,5	133,4	8,1

Dari Tabel 2 terlihat bahwa tinggi tanaman tertinggi dicapai oleh varietas Inpari 42 dengan rata-rata tinggi tanaman 106,8 cm sedangkan Inpari Nutri Zinc dengan tinggi tanaman 99 cm, rata-rata panjang malai kedua varietas tersebut hampir sama dengan panjang malai masing masing antara 24,50 cm pada Inpari 42, dan pada Inpari Nutri Zinc 24,56 cm. Jumlah anakan produktif antara 16,0 – 32,0 batang per rumpun, dengan jumlah anakan pada varietas Inpari 42 mencapai 24,2 batang perumpun, sedangkan jumlah anakan pada Inpari Nutri Zinc sebanyak 24,4. Produksi GKP varietas Inpari 42 mencapai 6,579 ton/ha dan produksi varietas Inpari Nutri Zinc 8,155 gkp ton/ha. Jumlah anakan produktif berpengaruh terhadap jumlah malai perumpun.

Tinggi tanaman merupakan salah satu kriteria seleksi pada tanaman padi, tetapi pertumbuhan yang tinggi belum menjamin tingkat produksinya. Tinggi tanaman mempunyai pengaruh yang besar terhadap hubungan antara panjang malai dengan hasil. Selanjutnya Perbedaan tinggi tanaman antar varietas tersebut sangat dipengaruhi oleh perbedaan faktor genetik masing-masing varietas. Sedangkan Jumlah malai akan berkorelasi positif dengan hasil, karena makin banyak jumlah malai makin banyak jumlah gabah.

4.5. Panen dan Pengolahan benih sumber padi

Pada kegiatan pengelolaan benih sumber padi yang perlu diperhatikan sebelum proses panen berlangsung, yaitu (1) memisahkan malai sisa *roughing* dari areal tanam, (2) membersihkan peralatan yang digunakan untuk panen, (3) memisahkan dua baris tanaman yang paling pinggir dengan tanaman lainnya. Kegiatan tersebut dilakukan untuk menjaga kemurnian benih agar tidak tercampur dengan varietas lain. Proses pengolahan benih, meliputi pengeringan, pembersihan, penimbangan, pengujian mutu benih, dan pengemasan.

Hasil pengolahan calon benih padi FS produksi UPBS BPTP tahun 2022, adalah varietas Inpari Nutri Zinc dan varietas Inpari 42 masing-masing sebanyak 2.500 kg. Produksi benih sumber FS (Label Putih) yang sudah diproses dan berlabel milik UPBS BPTP Sumatera Selatan yaitu varietas Inpari NUtri Zinc sebanyak 2.500 kg, sedangkan untuk varietas Inpari 42 sebanyak 2.500 kg tidak tersertifikasi, akan tetapi sudah terjual habis dengan harga gabah konsumsi.

Tabel 3. Hasil produksi benih sumber padi FS tahun 2022

No	Varietas	Kelas Benih	Jumlah (kg)	Keterangan
1	Inpari 42	FS	2500	Tidak tersertifikasi
2	Inpari NUtri Zinc	FS	2500	Sudah Tersertifikasi

Sumber : Data primer, 2022

**Lampiran Foto Kegiatan Produksi Benih Sumber FS 5 Ton
Di Desa Sidomulyo Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur**



DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. 2006. Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Pertanian Dalam Negeri. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Kementerian Pertanian, Jakarta.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 2009. Pedoman Umum Mendayagunakan Balit dan BPTP Serta Sinergi Balit-BPTP Mendukung Program Strategis Kementerian Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Kementerian Pertanian, Jakarta.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. 2014. Panduan Kerjasama Kemitraan Pengkajian dan Pengembangan Inovasi Pertanian Spesifik Lokasi (KKP3SL). 2015. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian, Jakarta.
- Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan. 2011. Rencana Strategis 2010-2014. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan, Kementerian Pertanian, Palembang.
- Hanafi. 1988. Memasyarakatkan Ide-Ide Baru. Disarikan dari karya E. Roger dan F.F Shoemaker. Communication of Inovations. Penerbit Usaha Nasional, Surabaya.